

Dakwah Inovatif Di Era AI



KASMUI

DAKWAH INOVATIF DI ERA AI

*Strategi, Etika, Literasi, dan Transformasi Dakwah Islam
di Zaman Kecerdasan Buatan*

Edisi 2026

Penulis: Kasmui

Dakwah Inovatif di Era AI

Edisi 2026. Naskah ini disusun sebagai buku akademik-praktis untuk mahasiswa, dosen, mubaligh, ustadz, pengelola lembaga dakwah, dan cendekiawan Muslim. Identitas penulis, penerbit, ISBN, kota terbit, dan hak penerbitan dapat diisi pada tahap pra-terbit.

Catatan metodologis: buku ini menggunakan literatur akademik, standar tata kelola AI, dokumen kebijakan, serta karya tentang dakwah digital sebagai fondasi. Buku “Kreasi Dakwah di Era AI: Optimalisasi Penyiaran Islam dengan Kecerdasan Buatan” (2025) digunakan sebagai salah satu bahan mentah untuk memahami alur tema, tetapi struktur dan isi buku ini dikembangkan ulang dengan perhatian khusus pada perkembangan AI generatif, multimodal, agentic AI, governance, provenance, dan kebijakan sampai 2026.

Peringatan akademik: keluaran AI tidak boleh diperlakukan sebagai fatwa atau otoritas keagamaan. Untuk masalah hukum Islam, kesehatan, keamanan, psikologi, dan perkara personal berisiko tinggi, keputusan harus dirujuk kepada ahli yang kompeten dan sumber yang dapat diverifikasi.

KATA PENGANTAR

Perkembangan kecerdasan buatan dalam beberapa tahun terakhir mengubah lanskap komunikasi lebih cepat daripada perubahan media digital pada dekade sebelumnya. Model generatif tidak lagi hanya menghasilkan teks, tetapi juga gambar, suara, video, kode, analisis dokumen, serta tindakan melalui penggunaan alat. Pada 2026, kemampuan multimodal dan agen AI semakin dekat dengan aktivitas sehari-hari. Perubahan tersebut membuka ruang yang luas bagi dakwah: riset lebih cepat, akses materi lebih inklusif, produksi konten lebih efisien, dan komunikasi lintas bahasa menjadi lebih mudah. Namun ruang yang sama juga membawa risiko halusinasi, deepfake, bias, kebocoran data, pelanggaran hak cipta, dan pergeseran otoritas keagamaan.

Buku ini disusun untuk menjembatani dua kebutuhan yang sering dipisahkan: kebutuhan inovasi dan kebutuhan kehati-hatian. Dakwah tidak dapat mengabaikan teknologi, tetapi juga tidak boleh menyerahkan proses pengetahuan kepada teknologi secara penuh. Karena itu, pendekatan buku ini menempatkan AI sebagai instrumen bantu yang harus tunduk pada prinsip tabayyun, amanah, kemaslahatan, transparansi, pengawasan manusia, dan pertanggungjawaban sumber. Prinsip tersebut dipertemukan dengan kerangka kontemporer seperti UNESCO Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence, NIST AI Risk Management Framework, OECD AI Principles, regulasi AI Eropa, standar provenance C2PA, serta perkembangan kebijakan AI Indonesia.

Sasaran pembaca buku ini sengaja dibuat luas. Mahasiswa memperoleh kerangka konseptual dan praktik literasi AI; dosen memperoleh bahan untuk pembelajaran, riset, dan kebijakan akademik; mubaligh dan ustadz memperoleh alur kerja yang aman untuk membuat naskah, audio, video, dan layanan tanya-jawab; sedangkan cendekiawan Muslim memperoleh isu epistemologi, otoritas, maqasid al-shariah, governance, serta agenda riset yang memerlukan pengembangan lebih lanjut. Buku ini bukan manual satu aplikasi. Nama produk AI cepat berubah, sehingga pembahasan diarahkan pada prinsip, proses, dan keterampilan yang tetap relevan ketika platform berganti.

Struktur buku bergerak dari fondasi menuju implementasi. Bagian awal membahas perubahan ekologi dakwah dan lanskap AI 2026; bagian berikutnya membahas epistemologi, audiens, prompt, RAG, produksi konten, media sintetis, media sosial, dan chatbot. Bagian etika membahas tabayyun, privasi, keamanan, bias, maqasid, serta tata kelola. Bagian kelembagaan membahas literasi, manajemen organisasi, evaluasi dampak, dan agenda 2026-2030. Lampiran menyertakan SOP, checklist editorial, contoh disclosure, matriks risiko, dan glosarium. Tidak ada soal latihan atau pembahasan soal karena buku ini dirancang sebagai referensi dan panduan profesional.

Buku ini tetap memiliki keterbatasan. Perkembangan AI sangat cepat dan beberapa ketentuan regulasi dapat berubah setelah buku diterbitkan. Karena itu, pembaca dianjurkan memeriksa versi terbaru dokumen resmi sebelum menerapkan kebijakan. Contoh yang disajikan juga tidak dimaksudkan menggantikan keputusan ulama, dewan etik, ahli hukum, atau spesialis keamanan. Harapannya, buku ini membantu pembaca membangun budaya penggunaan AI yang produktif sekaligus kritis: terbuka terhadap inovasi, tetapi tidak kehilangan disiplin verifikasi dan tanggung jawab moral.

Terima kasih disampaikan secara umum kepada para peneliti, pengembang teknologi, ulama, pendidik, pengelola komunitas, dan lembaga yang terus mengembangkan pengetahuan mengenai AI dan komunikasi keagamaan. Semoga buku ini dapat menjadi salah satu jembatan antara tradisi ilmu, kebutuhan dakwah kontemporer, dan teknologi yang terus berkembang. Masukan ilmiah dan koreksi sangat diperlukan agar edisi berikutnya semakin matang.

Oktober 2026

Penyusun,



Kasmui

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI.....	6
CARA MENGGUNAKAN BUKU INI.....	11
BAB 1 DAKWAH, INOVASI, DAN PERUBAHAN EKOLOGI KOMUNIKASI	13
1.1 Dakwah sebagai misi nilai di tengah disrupsi digital	13
1.2 Dari mimbar ke ruang algoritmik	14
1.3 Karakter audiens digital dan budaya atensi	16
1.4 Inovasi tanpa kehilangan otoritas dan adab.....	18
1.5 Peta kompetensi mubaligh pada era AI.....	19
1.6 Sintesis Bab	21
BAB 2 LANDSKAP KECERDASAN BUATAN 2026.....	23
2.1 Dari machine learning ke generative AI.....	23
2.2 Model bahasa besar, multimodal, dan reasoning	24
2.3 Agentic AI dan penggunaan alat	26
2.4 Model lokal, bahasa Indonesia, dan kedaulatan data	28
2.5 Arah perkembangan AI menurut AI Index 2026.....	29
2.6 Sintesis Bab	31
BAB 3 EPISTEMOLOGI PENGETAHUAN KEISLAMAN DAN BATAS OTORITAS AI.....	33
3.1 Sumber pengetahuan dan hirarki otoritas	33
3.2 AI sebagai alat bantu, bukan subjek ijtihad.....	34
3.3 Masalah halusinasi, konteks, dan sanad digital	36
3.4 Perbedaan informasi, nasihat, dan fatwa	38
3.5 Model kolaborasi AI-ulama-akademisi	39
3.6 Sintesis Bab	41
BAB 4 MEMAHAMI AUDIENS DAN KOMUNIKASI DAKWAH BERBASIS DATA.....	42
4.1 Segmentasi audiens secara etis.....	42

4.2 Persona, kebutuhan, dan tingkat literasi	43
4.3 Analitik perilaku tanpa manipulasi.....	45
4.4 Bahasa, budaya, usia, dan aksesibilitas	47
4.5 Merancang perjalanan audiens dari tahu ke bertindak	48
4.6 Sintesis Bab	50
BAB 5 PROMPT ENGINEERING, RAG, DAN PENELUSURAN SUMBER...	53
5.1 Prompt sebagai instruksi ilmiah yang dapat diaudit.....	53
5.2 Teknik konteks, peran, batasan, dan format	54
5.3 Retrieval-Augmented Generation untuk dakwah	56
5.4 Sitasi, metadata, dan jejak sumber	58
5.5 Workflow verifikasi sebelum publikasi	59
5.6 Sintesis Bab	61
BAB 6 MENULIS NASKAH DAKWAH DAN MATERI PENDIDIKAN DENGAN AI.....	63
6.1 Dari outline ke naskah yang koheren	63
6.2 Khutbah, ceramah, artikel, dan modul	64
6.3 Menjaga akurasi dalil dan translasi	66
6.4 Gaya bahasa untuk mahasiswa dan publik	68
6.5 Penyuntingan, fact-check, dan disclosure AI	69
6.6 Sintesis Bab	71
BAB 7 PRODUKSI AUDIO, PODCAST, DAN SUARA SINTETIS	73
7.1 Desain program audio dakwah	73
7.2 Transkripsi dan peringkasan otomatis	74
7.3 Text-to-speech dan voice cloning.....	76
7.4 Aksesibilitas dan bahasa daerah	78
7.5 Etika persetujuan dan identitas suara	79
7.6 Sintesis Bab	81
BAB 8 GAMBAR, VIDEO, AVATAR, DAN MEDIA SINTETIS	82
8.1 Visual dakwah sebagai media penjelasan	82
8.2 Generasi gambar dan ilustrasi yang bertanggung jawab	83

8.3 Video otomatis dan avatar presenter	85
8.4 Deepfake, manipulasi, dan autentisitas	87
8.5 Content Credentials dan provenance	88
8.6 Sintesis Bab	90
BAB 9 MEDIA SOSIAL, ALGORITMA, DAN STRATEGI DISTRIBUSI	92
9.1 Cara kerja rekomendasi secara konseptual.....	92
9.2 Strategi format lintas platform	93
9.3 SEO, pencarian, dan discoverability	95
9.4 Menghindari jebakan clickbait dan polarisasi	97
9.5 Kalender editorial dan orkestrasi kanal	98
9.6 Sintesis Bab	100
BAB 10 CHATBOT, ASISTEN VIRTUAL, DAN AGENTIC AI UNTUK DAKWAH	102
10.1 Use case chatbot keislaman	102
10.2 Desain basis pengetahuan dan guardrails	103
10.3 Eskalasi pertanyaan sensitif kepada manusia	105
10.4 Agen AI untuk administrasi dan riset.....	107
10.5 Pengujian kualitas, keamanan, dan audit log	108
10.6 Sintesis Bab	110
BAB 11 TABAYYUN DIGITAL: HALUSINASI, MISINFORMASI, DAN VERIFIKASI	113
11.1 Tabayyun sebagai prinsip kerja informasi.....	113
11.2 Jenis halusinasi pada model generatif	114
11.3 Verifikasi ayat, hadis, sejarah, dan statistik	116
11.4 Membangun checklist editorial	118
11.5 Respons koreksi dan transparansi kesalahan.....	119
11.6 Sintesis Bab	121
BAB 12 PRIVASI, DATA, KEAMANAN SIBER, DAN HAK CIPTA	123
12.1 Data pribadi dalam kegiatan dakwah	123
12.2 Minimisasi data dan kontrol akses	124

12.3 Keamanan akun, prompt, dan dokumen	126
12.4 Hak cipta dan materi berlisensi	128
12.5 Kebijakan internal penggunaan AI	129
12.6 Sintesis Bab	131
BAB 13 BIAS, KEADILAN, MODERASI, DAN RISIKO POLARISASI.....	132
13.1 Bias data dan bias representasi	132
13.2 Sensitivitas mazhab dan keragaman tradisi	133
13.3 Algoritma amplifikasi dan echo chamber	135
13.4 Moderasi konten yang proporsional	137
13.5 Mengukur fairness dan keberagaman sumber	138
13.6 Sintesis Bab	140
BAB 14 ETIKA ISLAM, MAQASID AL-SHARIAH, DAN GOVERNANCE AI	141
14.1 Maqasid sebagai lensa evaluasi teknologi	141
14.2 Masalah, mafsadah, dan kehati-hatian	142
14.3 Akuntabilitas manusia dan amanah	144
14.4 Transparansi, keadilan, dan pengawasan manusia	146
14.5 Kerangka TAJDID-AI untuk organisasi dakwah	147
14.6 Sintesis Bab	149
BAB 15 LITERASI AI UNTUK MAHASISWA, DOSEN, MUBALIGH, DAN USTADZ	152
15.1 Kompetensi dasar yang wajib dimiliki	152
15.2 Kurikulum literasi AI bertingkat	153
15.3 Belajar dengan AI tanpa kehilangan daya pikir	155
15.4 Praktik akademik dan sitasi yang bertanggung jawab.....	157
15.5 Membangun budaya belajar sepanjang hayat.....	158
15.6 Sintesis Bab	160
BAB 16 MANAJEMEN ORGANISASI DAKWAH BERBASIS AI.....	162
16.1 Peta proses dan prioritas otomasi	162
16.2 Tim lintas disiplin dan pembagian peran	163

16.3 SOP penggunaan AI dan tingkat risiko	165
16.4 Manajemen vendor dan layanan cloud	167
16.5 Audit, dokumentasi, dan perbaikan berkelanjutan	168
16.6 Sintesis Bab	170
BAB 17 MENGUKUR DAMPAK DAKWAH: DARI METRIK PLATFORM KE PERUBAHAN SOSIAL	172
17.1 Membedakan vanity metrics dan outcome	172
17.2 Indikator pemahaman dan kepercayaan	173
17.3 Metode survei, analitik, dan triangulasi	175
17.4 Eksperimen konten secara etis	177
17.5 Pelaporan dampak dan pembelajaran organisasi	178
17.6 Sintesis Bab	180
BAB 18 MASA DEPAN DAKWAH 2026-2030 DAN AGENDA STRATEGIS	182
18.1 Tren teknologi yang perlu dipantau	182
18.2 AI personal namun tetap human-centered	183
18.3 Kedaulatan bahasa dan pengetahuan Islam	185
18.4 Regulasi, provenance, dan standar baru	187
18.5 Agenda riset dan transformasi kelembagaan	189
18.6 Sintesis Bab	191
PENUTUP	192
LAMPIRAN A SOP PENGGUNAAN AI UNTUK PRODUKSI DAKWAH ...	193
LAMPIRAN B CHECKLIST EDITORIAL DAN TABAYYUN DIGITAL	194
LAMPIRAN C CONTOH KEBIJAKAN DISCLOSURE PENGGUNAAN AI	195
LAMPIRAN D TEMPLATE PROMPT PROFESIONAL UNTUK DAKWAH	196
GLOSARIUM	197
DAFTAR PUSTAKA	199

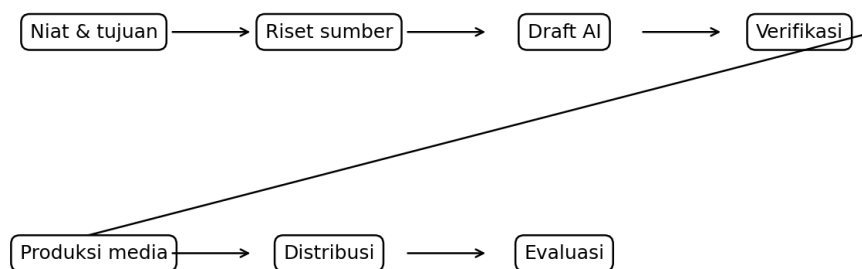
CARA MENGGUNAKAN BUKU INI

Buku ini dapat dibaca berurutan atau secara modular. Pembaca yang baru mengenal AI sebaiknya memulai dari Bab 1-3. Pembaca yang ingin langsung menggunakan AI untuk produksi dakwah dapat melanjutkan ke Bab 5-10, tetapi tetap perlu membaca Bab 11-14 sebelum mempublikasikan materi berisiko tinggi. Pengelola organisasi, program studi, dan lembaga dakwah dapat memprioritaskan Bab 15-18 beserta lampiran tata kelola.

Setiap bab memiliki tiga lapisan: konsep, praktik, dan kontrol risiko. Lapisan konsep menjawab mengapa suatu teknologi penting; lapisan praktik memberi alur kerja; dan lapisan kontrol risiko memastikan bahwa efisiensi tidak merusak akurasi, privasi, atau otoritas. Tabel dan diagram dibuat sebagai alat bantu implementasi, bukan dekorasi. Pembaca dianjurkan menyesuaikan alur kerja dengan kebijakan organisasi dan tingkat risiko materi.

Istilah teknis dijelaskan dalam glosarium. Ketika buku menyebut 'AI', maknanya dapat mencakup machine learning, model generatif, model bahasa besar, multimodal AI, atau agen AI sesuai konteks. Ketika disebut 'verifikasi manusia', yang dimaksud bukan sekadar membaca ulang, melainkan memeriksa sumber, konteks, konsekuensi, dan kesesuaian dengan otoritas yang relevan.

Siklus Dakwah Berbantu AI yang Bertanggung Jawab



Gambar 1. Siklus dakwah berbantu AI yang bertanggung jawab.

BAGIAN I - FONDASI DAN PERUBAHAN EKOLOGI DAKWAH

Bagian ini mengembangkan kerangka analitis dan praktis yang saling berhubungan. Pembaca dapat menggunakan tabel, diagram, dan checklist sebagai alat kerja untuk menyesuaikan prinsip buku dengan konteks lembaganya.

BAB 1 DAKWAH, INOVASI, DAN PERUBAHAN EKOLOGI KOMUNIKASI

Bab ini membahas perubahan ekologi komunikasi, otoritas keagamaan, budaya platform, literasi digital, dan prinsip hikmah dalam penyampaian pesan. Fokus utamanya adalah membangun kemampuan mengambil keputusan, bukan hanya mengenalkan perangkat. Dalam konteks 2026, perubahan teknologi perlu dibaca bersama perubahan sosial, kebijakan, dan ekspektasi publik. Rujukan kunci yang menopang pembahasan antara lain Campbell (2013), Bunt (2018), Huda dkk. (2025), Setiawan dkk. (2022).

1.1 Dakwah sebagai misi nilai di tengah disrupsi digital

Dakwah sebagai misi nilai di tengah disrupsi digital perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, perubahan ekologi komunikasi, otoritas keagamaan, budaya platform, literasi digital, dan prinsip hikmah dalam penyampaian pesan saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada kajian singkat di Instagram, kelas tafsir daring, kanal YouTube, podcast, dan layanan tanya-jawab komunitas. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. Campbell (2013) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan Bunt (2018) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti dakwah sebagai misi nilai di tengah disrupsi digital tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap dakwah sebagai misi nilai di tengah disrupsi digital, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko

Huda dkk. (2025): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam dakwah sebagai misi nilai di tengah disrupsi digital, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. Setiawan dkk. (2022) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada dakwah sebagai misi nilai di tengah disrupsi digital, risiko serupa dapat berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan dakwah sebagai misi nilai di tengah disrupsi digital hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

1.2 Dari mimbar ke ruang algoritmik

Dari mimbar ke ruang algoritmik perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, perubahan ekologi komunikasi, otoritas keagamaan, budaya platform, literasi digital, dan prinsip hikmah dalam penyampaian pesan saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah

cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada kajian singkat di Instagram, kelas tafsir daring, kanal YouTube, podcast, dan layanan tanya-jawab komunitas. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. Campbell (2013) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan Bunt (2018) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti dari mimbar ke ruang algoritmik tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap dari mimbar ke ruang algoritmik, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko Huda dkk. (2025): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam dari mimbar ke ruang algoritmik, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. Setiawan dkk. (2022) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan

syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada dari mimbar ke ruang algoritmik, risiko serupa dapat berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan dari mimbar ke ruang algoritmik hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

Prinsip kerja: gunakan AI untuk memperluas kapasitas manusia dalam dari mimbar ke ruang algoritmik, tetapi jangan mengalihkan tanggung jawab verifikasi, penilaian etis, dan keputusan akhir kepada model.

Prinsip operasional buku

1.3 Karakter audiens digital dan budaya atensi

Karakter audiens digital dan budaya atensi perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, perubahan ekologi komunikasi, otoritas keagamaan, budaya platform, literasi digital, dan prinsip hikmah dalam penyampaian pesan saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada kajian singkat di Instagram, kelas tafsir daring, kanal YouTube, podcast, dan layanan tanya-jawab komunitas. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. Campbell (2013) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan Bunt (2018) menempatkan literasi,

keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti karakter audiens digital dan budaya atensi tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap karakter audiens digital dan budaya atensi, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko Huda dkk. (2025): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam karakter audiens digital dan budaya atensi, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. Setiawan dkk. (2022) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada karakter audiens digital dan budaya atensi, risiko serupa dapat berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan karakter audiens digital dan budaya atensi hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan

sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

1.4 Inovasi tanpa kehilangan otoritas dan adab

Inovasi tanpa kehilangan otoritas dan adab perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, perubahan ekologi komunikasi, otoritas keagamaan, budaya platform, literasi digital, dan prinsip hikmah dalam penyampaian pesan saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada kajian singkat di Instagram, kelas tafsir daring, kanal YouTube, podcast, dan layanan tanya-jawab komunitas. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. Campbell (2013) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan Bunt (2018) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti inovasi tanpa kehilangan otoritas dan adab tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap inovasi tanpa kehilangan otoritas dan adab, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko Huda dkk. (2025): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam inovasi tanpa kehilangan otoritas dan adab, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. Setiawan dkk. (2022) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada inovasi tanpa kehilangan otoritas dan adab, risiko serupa dapat berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan inovasi tanpa kehilangan otoritas dan adab hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

Prinsip kerja: gunakan AI untuk memperluas kapasitas manusia dalam inovasi tanpa kehilangan otoritas dan adab, tetapi jangan mengalihkan tanggung jawab verifikasi, penilaian etis, dan keputusan akhir kepada model.

Prinsip operasional buku

1.5 Peta kompetensi mubaligh pada era AI

Peta kompetensi mubaligh pada era AI perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan

sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, perubahan ekologi komunikasi, otoritas keagamaan, budaya platform, literasi digital, dan prinsip hikmah dalam penyampaian pesan saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada kajian singkat di Instagram, kelas tafsir daring, kanal YouTube, podcast, dan layanan tanya-jawab komunitas. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. Campbell (2013) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan Bunt (2018) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti peta kompetensi mubaligh pada era ai tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap peta kompetensi mubaligh pada era ai, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko Huda dkk. (2025): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam peta kompetensi mubaligh pada era ai, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. Setiawan dkk. (2022) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada peta kompetensi mubaligh pada era ai, risiko serupa dapat berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan peta kompetensi mubaligh pada era ai hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

Tabel 1.1. Ringkasan kontrol implementasi Bab 1

Tahap	Pertanyaan kendali	Bukti yang disimpan
Tujuan	Apa manfaat yang ingin dicapai?	brief kegiatan
Sumber	Apakah sumber dapat dilacak?	daftar referensi/URL
AI	Apa batas instruksi dan data?	prompt/log
Review	Siapa yang memeriksa?	catatan revisi
Publikasi	Apakah ada disclosure bila perlu?	versi final
Evaluasi	Apa dampak dan koreksi?	metrik + log insiden

1.6 Sintesis Bab

Inti Bab 1 adalah bahwa perubahan ekologi komunikasi, otoritas keagamaan, budaya platform, literasi digital, dan prinsip hikmah dalam penyampaian pesan harus dikelola sebagai satu sistem. Keberhasilan tidak lahir dari penggunaan AI sebanyak-banyaknya, tetapi dari kecocokan antara tujuan, sumber, kompetensi manusia, mekanisme review, dan evaluasi dampak. Organisasi yang memiliki disiplin dokumentasi akan lebih mudah memanfaatkan model baru tanpa mengulang kesalahan dasar. Sebaliknya, organisasi yang hanya mengejar kecepatan

berisiko memproduksi lebih banyak konten tetapi sekaligus memperbesar kesalahan, kebingungan, dan beban koreksi.

Bagi mahasiswa dan dosen, pesan utama bab ini adalah menjaga proses berpikir dan keterlacakan sumber. Bagi mubaligh dan ustadz, pesan utamanya adalah menjaga amanah isi dan konteks. Bagi pengelola organisasi, pesan utamanya adalah membangun SOP, peran, dan mekanisme audit. Ketiga kelompok tersebut bertemu pada satu prinsip: AI memberi manfaat ketika diletakkan di bawah kendali tujuan manusia yang jelas, sumber yang dapat diperiksa, dan etika yang konsisten.

BAB 2 LANDSKAP KECERDASAN BUATAN 2026

Bab ini membahas perkembangan AI mutakhir, model generatif, multimodalitas, agen, model lokal, efisiensi komputasi, dan implikasi sosial. Fokus utamanya adalah membangun kemampuan mengambil keputusan, bukan hanya mengenalkan perangkat. Dalam konteks 2026, perubahan teknologi perlu dibaca bersama perubahan sosial, kebijakan, dan ekspektasi publik. Rujukan kunci yang menopang pembahasan antara lain Stanford HAI (2026), UNESCO (2023), OECD (2024), Komdigi (2026).

2.1 Dari machine learning ke generative AI

Dari machine learning ke generative AI perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, perkembangan AI mutakhir, model generatif, multimodalitas, agen, model lokal, efisiensi komputasi, dan implikasi sosial saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada model bahasa besar, sistem multimodal, penerjemah otomatis, pencarian semantik, agen riset, dan model lokal berbahasa Indonesia. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. Stanford HAI (2026) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan UNESCO (2023) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti dari machine learning ke generative ai tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap dari machine learning ke generative ai, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko OECD (2024): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak,

lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam dari machine learning ke generative ai, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. Komdigi (2026) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada dari machine learning ke generative ai, risiko serupa dapat berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan dari machine learning ke generative ai hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

2.2 Model bahasa besar, multimodal, dan reasoning

Model bahasa besar, multimodal, dan reasoning perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, perkembangan AI mutakhir, model generatif, multimodalitas, agen, model lokal, efisiensi komputasi, dan implikasi sosial saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan

dakwah yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada model bahasa besar, sistem multimodal, penerjemah otomatis, pencarian semantik, agen riset, dan model lokal berbahasa Indonesia. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. Stanford HAI (2026) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan UNESCO (2023) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti model bahasa besar, multimodal, dan reasoning tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap model bahasa besar, multimodal, dan reasoning, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko OECD (2024): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam model bahasa besar, multimodal, dan reasoning, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. Komdigi (2026) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah

nuansa bahasa. Pada model bahasa besar, multimodal, dan reasoning, risiko serupa dapat berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan model bahasa besar, multimodal, dan reasoning hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

Prinsip kerja: gunakan AI untuk memperluas kapasitas manusia dalam model bahasa besar, multimodal, dan reasoning, tetapi jangan mengalihkan tanggung jawab verifikasi, penilaian etis, dan keputusan akhir kepada model.

Prinsip operasional buku

2.3 Agentic AI dan penggunaan alat

Agentic AI dan penggunaan alat perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, perkembangan AI mutakhir, model generatif, multimodalitas, agen, model lokal, efisiensi komputasi, dan implikasi sosial saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada model bahasa besar, sistem multimodal, penerjemah otomatis, pencarian semantik, agen riset, dan model lokal berbahasa Indonesia. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. Stanford HAI (2026) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan UNESCO (2023) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat

penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti agentic ai dan penggunaan alat tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap agentic ai dan penggunaan alat, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko OECD (2024): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam agentic ai dan penggunaan alat, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. Komdigi (2026) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada agentic ai dan penggunaan alat, risiko serupa dapat berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan agentic ai dan penggunaan alat hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada

kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

2.4 Model lokal, bahasa Indonesia, dan kedaulatan data

Model lokal, bahasa Indonesia, dan kedaulatan data perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, perkembangan AI mutakhir, model generatif, multimodalitas, agen, model lokal, efisiensi komputasi, dan implikasi sosial saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada model bahasa besar, sistem multimodal, penerjemah otomatis, pencarian semantik, agen riset, dan model lokal berbahasa Indonesia. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. Stanford HAI (2026) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan UNESCO (2023) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti model lokal, bahasa Indonesia, dan kedaulatan data tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap model lokal, bahasa Indonesia, dan kedaulatan data, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko OECD (2024): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam model lokal, bahasa indonesia, dan kedaulatan data, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. Komdigi (2026) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada model lokal, bahasa indonesia, dan kedaulatan data, risiko serupa dapat berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan model lokal, bahasa indonesia, dan kedaulatan data hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

Prinsip kerja: gunakan AI untuk memperluas kapasitas manusia dalam model lokal, bahasa indonesia, dan kedaulatan data, tetapi jangan mengalihkan tanggung jawab verifikasi, penilaian etis, dan keputusan akhir kepada model.

Prinsip operasional buku

2.5 Arah perkembangan AI menurut AI Index 2026

Arah perkembangan AI menurut AI Index 2026 perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan

sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, perkembangan AI mutakhir, model generatif, multimodalitas, agen, model lokal, efisiensi komputasi, dan implikasi sosial saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada model bahasa besar, sistem multimodal, penerjemah otomatis, pencarian semantik, agen riset, dan model lokal berbahasa Indonesia. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. Stanford HAI (2026) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan UNESCO (2023) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti arah perkembangan ai menurut ai index 2026 tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap arah perkembangan ai menurut ai index 2026, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko OECD (2024): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam arah perkembangan ai menurut ai index 2026, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. Komdigi (2026) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada arah perkembangan ai menurut ai index 2026, risiko serupa dapat berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan arah perkembangan ai menurut ai index 2026 hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

Tabel 2.1. Ringkasan kontrol implementasi Bab 2

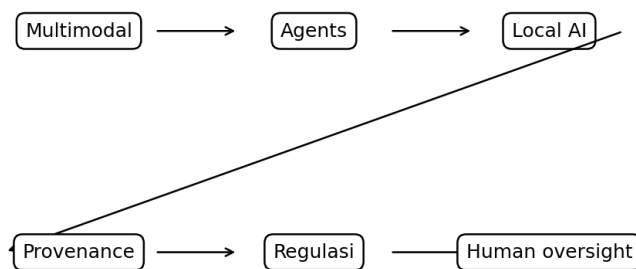
Tahap	Pertanyaan kendali	Bukti yang disimpan
Tujuan	Apa manfaat yang ingin dicapai?	brief kegiatan
Sumber	Apakah sumber dapat dilacak?	daftar referensi/URL
AI	Apakah batas instruksi dan data?	prompt/log
Review	Siapa yang memeriksa?	catatan revisi
Publikasi	Apakah ada disclosure bila perlu?	versi final
Evaluasi	Apakah dampak dan koreksi?	metrik + log insiden

2.6 Sintesis Bab

Inti Bab 2 adalah bahwa perkembangan AI mutakhir, model generatif, multimodalitas, agen, model lokal, efisiensi komputasi, dan implikasi sosial harus dikelola sebagai satu sistem. Keberhasilan tidak lahir dari penggunaan AI sebanyak-banyaknya, tetapi dari kecocokan antara tujuan, sumber, kompetensi manusia, mekanisme review, dan evaluasi dampak. Organisasi yang memiliki disiplin dokumentasi akan lebih mudah memanfaatkan model baru tanpa mengulang kesalahan dasar. Sebaliknya, organisasi yang hanya mengejar kecepatan berisiko memproduksi lebih banyak konten tetapi sekaligus memperbesar kesalahan, kebingungan, dan beban koreksi.

Bagi mahasiswa dan dosen, pesan utama bab ini adalah menjaga proses berpikir dan keterlacakan sumber. Bagi mubaligh dan ustadz, pesan utamanya adalah menjaga amanah isi dan konteks. Bagi pengelola organisasi, pesan utamanya adalah membangun SOP, peran, dan mekanisme audit. Ketiga kelompok tersebut bertemu pada satu prinsip: AI memberi manfaat ketika diletakkan di bawah kendali tujuan manusia yang jelas, sumber yang dapat diperiksa, dan etika yang konsisten.

Horizon Teknologi dan Tata Kelola 2026-2030



Gambar 2. Horizon teknologi dan tata kelola AI 2026-2030.

BAB 3 EPISTEMOLOGI PENGETAHUAN KEISLAMAN DAN BATAS OTORITAS AI

Bab ini membahas epistemologi Islam, otoritas, sanad, verifikasi dalil, fiqh kontemporer, dan pembagian peran manusia-mesin. Fokus utamanya adalah membangun kemampuan mengambil keputusan, bukan hanya mengenalkan perangkat. Dalam konteks 2026, perubahan teknologi perlu dibaca bersama perubahan sosial, kebijakan, dan ekspektasi publik. Rujukan kunci yang menopang pembahasan antara lain Elmahjub (2023), Belhassen dkk. (2025), Fatimah dkk. (2026), Marwantika & Dauda (2025).

3.1 Sumber pengetahuan dan hirarki otoritas

Sumber pengetahuan dan hirarki otoritas perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, epistemologi Islam, otoritas, sanad, verifikasi dalil, fiqh kontemporer, dan pembagian peran manusia-mesin saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada jawaban fiqh, penelusuran hadis, perbedaan mazhab, rujukan fatwa, dan penyusunan materi khutbah. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. Elmahjub (2023) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan Belhassen dkk. (2025) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti sumber pengetahuan dan hirarki otoritas tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap sumber pengetahuan dan hirarki otoritas, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko Fatimah dkk. (2026): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan

dampak, lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam sumber pengetahuan dan hirarki otoritas, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. Marwantika & Dauda (2025) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada sumber pengetahuan dan hirarki otoritas, risiko serupa dapat berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan sumber pengetahuan dan hirarki otoritas hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

3.2 AI sebagai alat bantu, bukan subjek ijtihad

AI sebagai alat bantu, bukan subjek ijtihad perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, epistemologi Islam, otoritas, sanad, verifikasi dalil, fiqh kontemporer, dan pembagian peran manusia-mesin saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah

yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada jawaban fiqh, penelusuran hadis, perbedaan mazhab, rujukan fatwa, dan penyusunan materi khutbah. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. Elmahjub (2023) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan Belhassen dkk. (2025) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti ai sebagai alat bantu, bukan subjek ijtihad tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap ai sebagai alat bantu, bukan subjek ijtihad, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko Fatimah dkk. (2026): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam ai sebagai alat bantu, bukan subjek ijtihad, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. Marwantika & Dauda (2025) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada ai sebagai alat bantu, bukan subjek ijtihad, risiko serupa dapat

berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan AI sebagai alat bantu, bukan subjek ijtihad hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

Prinsip kerja: gunakan AI untuk memperluas kapasitas manusia dalam AI sebagai alat bantu, bukan subjek ijtihad, tetapi jangan mengalihkan tanggung jawab verifikasi, penilaian etis, dan keputusan akhir kepada model.

Prinsip operasional buku

3.3 Masalah halusinasi, konteks, dan sanad digital

Masalah halusinasi, konteks, dan sanad digital perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, epistemologi Islam, otoritas, sanad, verifikasi dalil, fiqh kontemporer, dan pembagian peran manusia-mesin saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada jawaban fiqh, penelusuran hadis, perbedaan mazhab, rujukan fatwa, dan penyusunan materi khutbah. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. Elmahjub (2023) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan Belhassen dkk. (2025) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti masalah halusinasi, konteks, dan sanad digital tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan

dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap masalah halusinasi, konteks, dan sanad digital, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko Fatimah dkk. (2026): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam masalah halusinasi, konteks, dan sanad digital, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. Marwantika & Dauda (2025) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada masalah halusinasi, konteks, dan sanad digital, risiko serupa dapat berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan masalah halusinasi, konteks, dan sanad digital hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa

menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

3.4 Perbedaan informasi, nasihat, dan fatwa

Perbedaan informasi, nasihat, dan fatwa perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, epistemologi Islam, otoritas, sanad, verifikasi dalil, fiqh kontemporer, dan pembagian peran manusia-mesin saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada jawaban fiqh, penelusuran hadis, perbedaan mazhab, rujukan fatwa, dan penyusunan materi khutbah. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. Elmahjub (2023) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan Belhassen dkk. (2025) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti perbedaan informasi, nasihat, dan fatwa tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap perbedaan informasi, nasihat, dan fatwa, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko Fatimah dkk. (2026): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan

konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam perbedaan informasi, nasihat, dan fatwa, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. Marwantika & Dauda (2025) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada perbedaan informasi, nasihat, dan fatwa, risiko serupa dapat berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan perbedaan informasi, nasihat, dan fatwa hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

Prinsip kerja: gunakan AI untuk memperluas kapasitas manusia dalam perbedaan informasi, nasihat, dan fatwa, tetapi jangan mengalihkan tanggung jawab verifikasi, penilaian etis, dan keputusan akhir kepada model.

Prinsip operasional buku

3.5 Model kolaborasi AI-ulama-akademisi

Model kolaborasi AI-ulama-akademisi perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, epistemologi Islam, otoritas, sanad, verifikasi dalil, fiqh kontemporer, dan pembagian peran manusia-mesin saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima.

Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada jawaban fiqh, penelusuran hadis, perbedaan mazhab, rujukan fatwa, dan penyusunan materi khutbah. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. Elmahjub (2023) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan Belhassen dkk. (2025) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti model kolaborasi ai-ulama-akademisi tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap model kolaborasi ai-ulama-akademisi, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko Fatimah dkk. (2026): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam model kolaborasi ai-ulama-akademisi, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. Marwantika & Dauda (2025) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah

nuansa bahasa. Pada model kolaborasi ai-ulama-akademisi, risiko serupa dapat berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan model kolaborasi ai-ulama-akademisi hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

Tabel 3.1. Ringkasan kontrol implementasi Bab 3

Tingkat	Contoh penggunaan	Kontrol minimum
Rendah	ide judul, format, ringkasan non-sensitif	review editor
Sedang	draft artikel, terjemahan, materi kelas	cek sumber + review ahli
Tinggi	fatwa, konsultasi personal, isu konflik	ulama/ahli wajib, dokumentasi, eskalasi

3.6 Sintesis Bab

Inti Bab 3 adalah bahwa epistemologi Islam, otoritas, sanad, verifikasi dalil, fiqh kontemporer, dan pembagian peran manusia-mesin harus dikelola sebagai satu sistem. Keberhasilan tidak lahir dari penggunaan AI sebanyak-banyaknya, tetapi dari kecocokan antara tujuan, sumber, kompetensi manusia, mekanisme review, dan evaluasi dampak. Organisasi yang memiliki disiplin dokumentasi akan lebih mudah memanfaatkan model baru tanpa mengulang kesalahan dasar. Sebaliknya, organisasi yang hanya mengejar kecepatan berisiko memproduksi lebih banyak konten tetapi sekaligus memperbesar kesalahan, kebingungan, dan beban koreksi.

Bagi mahasiswa dan dosen, pesan utama bab ini adalah menjaga proses berpikir dan keterlacakan sumber. Bagi mubaligh dan ustadz, pesan utamanya adalah menjaga amanah isi dan konteks. Bagi pengelola organisasi, pesan utamanya adalah membangun SOP, peran, dan mekanisme audit. Ketiga kelompok tersebut bertemu pada satu prinsip: AI memberi manfaat ketika diletakkan di bawah kendali tujuan manusia yang jelas, sumber yang dapat diperiksa, dan etika yang konsisten.

BAB 4 MEMAHAMI AUDIENS DAN KOMUNIKASI DAKWAH BERBASIS DATA

Bab ini membahas analitik audiens, segmentasi etis, aksesibilitas, komunikasi persuasif non-manipulatif, dan desain pengalaman belajar. Fokus utamanya adalah membangun kemampuan mengambil keputusan, bukan hanya mengenalkan perangkat. Dalam konteks 2026, perubahan teknologi perlu dibaca bersama perubahan sosial, kebijakan, dan ekspektasi publik. Rujukan kunci yang menopang pembahasan antara lain UNESCO (2023), OECD (2024), NIST (2024), Campbell (2013).

4.1 Segmentasi audiens secara etis

Segmentasi audiens secara etis perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, analitik audiens, segmentasi etis, aksesibilitas, komunikasi persuasif non-manipulatif, dan desain pengalaman belajar saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada mahasiswa, jamaah masjid, pekerja muda, lansia, penyandang disabilitas, serta komunitas lintas bahasa. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. UNESCO (2023) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan OECD (2024) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti segmentasi audiens secara etis tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap segmentasi audiens secara etis, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko NIST (2024): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan

dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam segmentasi audiens secara etis, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. Campbell (2013) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada segmentasi audiens secara etis, risiko serupa dapat berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan segmentasi audiens secara etis hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

4.2 Persona, kebutuhan, dan tingkat literasi

Persona, kebutuhan, dan tingkat literasi perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, analitik audiens, segmentasi etis, aksesibilitas, komunikasi persuasif non-manipulatif, dan desain pengalaman belajar saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang

jasas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada mahasiswa, jamaah masjid, pekerja muda, lansia, penyandang disabilitas, serta komunitas lintas bahasa. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. UNESCO (2023) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan OECD (2024) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti persona, kebutuhan, dan tingkat literasi tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap persona, kebutuhan, dan tingkat literasi, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko NIST (2024): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam persona, kebutuhan, dan tingkat literasi, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. Campbell (2013) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada persona, kebutuhan, dan tingkat literasi, risiko serupa dapat

berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan persona, kebutuhan, dan tingkat literasi hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

Prinsip kerja: gunakan AI untuk memperluas kapasitas manusia dalam persona, kebutuhan, dan tingkat literasi, tetapi jangan mengalihkan tanggung jawab verifikasi, penilaian etis, dan keputusan akhir kepada model.

Prinsip operasional buku

4.3 Analitik perilaku tanpa manipulasi

Analitik perilaku tanpa manipulasi perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, analitik audiens, segmentasi etis, aksesibilitas, komunikasi persuasif non-manipulatif, dan desain pengalaman belajar saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada mahasiswa, jamaah masjid, pekerja muda, lansia, penyandang disabilitas, serta komunitas lintas bahasa. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. UNESCO (2023) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan OECD (2024) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti analitik perilaku tanpa manipulasi tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan

budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap analitik perilaku tanpa manipulasi, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko NIST (2024): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam analitik perilaku tanpa manipulasi, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. Campbell (2013) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada analitik perilaku tanpa manipulasi, risiko serupa dapat berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan analitik perilaku tanpa manipulasi hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau

pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

4.4 Bahasa, budaya, usia, dan aksesibilitas

Bahasa, budaya, usia, dan aksesibilitas perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, analitik audiens, segmentasi etis, aksesibilitas, komunikasi persuasif non-manipulatif, dan desain pengalaman belajar saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada mahasiswa, jamaah masjid, pekerja muda, lansia, penyandang disabilitas, serta komunitas lintas bahasa. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. UNESCO (2023) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan OECD (2024) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti bahasa, budaya, usia, dan aksesibilitas tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap bahasa, budaya, usia, dan aksesibilitas, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko NIST (2024): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan

konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam bahasa, budaya, usia, dan aksesibilitas, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. Campbell (2013) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada bahasa, budaya, usia, dan aksesibilitas, risiko serupa dapat berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan bahasa, budaya, usia, dan aksesibilitas hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

Prinsip kerja: gunakan AI untuk memperluas kapasitas manusia dalam bahasa, budaya, usia, dan aksesibilitas, tetapi jangan mengalihkan tanggung jawab verifikasi, penilaian etis, dan keputusan akhir kepada model.

Prinsip operasional buku

4.5 Merancang perjalanan audiens dari tahu ke bertindak

Merancang perjalanan audiens dari tahu ke bertindak perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, analitik audiens, segmentasi etis, aksesibilitas, komunikasi persuasif non-manipulatif, dan desain pengalaman belajar saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat

mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada mahasiswa, jamaah masjid, pekerja muda, lansia, penyandang disabilitas, serta komunitas lintas bahasa. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. UNESCO (2023) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan OECD (2024) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti merancang perjalanan audiens dari tahu ke bertindak tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap merancang perjalanan audiens dari tahu ke bertindak, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko NIST (2024): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam merancang perjalanan audiens dari tahu ke bertindak, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. Campbell (2013) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan

syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada merancang perjalanan audiens dari tahu ke bertindak, risiko serupa dapat berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan merancang perjalanan audiens dari tahu ke bertindak hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

Tabel 4.1. Ringkasan kontrol implementasi Bab 4

Tahap	Pertanyaan kendali	Bukti yang disimpan
Tujuan	Apa manfaat yang ingin dicapai?	brief kegiatan
Sumber	Apakah sumber dapat dilacak?	daftar referensi/URL
AI	Apa batas instruksi dan data?	prompt/log
Review	Siapa yang memeriksa?	catatan revisi
Publikasi	Apakah ada disclosure bila perlu?	versi final
Evaluasi	Apa dampak dan koreksi?	metrik + log insiden

4.6 Sintesis Bab

Inti Bab 4 adalah bahwa analitik audiens, segmentasi etis, aksesibilitas, komunikasi persuasif non-manipulatif, dan desain pengalaman belajar harus dikelola sebagai satu sistem. Keberhasilan tidak lahir dari penggunaan AI sebanyak-banyaknya, tetapi dari kecocokan antara tujuan, sumber, kompetensi manusia, mekanisme review, dan evaluasi dampak. Organisasi yang memiliki disiplin dokumentasi akan lebih mudah memanfaatkan model baru tanpa mengulang kesalahan dasar. Sebaliknya, organisasi yang hanya mengejar kecepatan berisiko memproduksi lebih banyak konten tetapi sekaligus memperbesar kesalahan, kebingungan, dan beban koreksi.

Bagi mahasiswa dan dosen, pesan utama bab ini adalah menjaga proses berpikir dan keterlacakan sumber. Bagi mubaligh dan ustadz, pesan utamanya adalah menjaga amanah isi dan konteks. Bagi pengelola organisasi, pesan utamanya adalah

membangun SOP, peran, dan mekanisme audit. Ketiga kelompok tersebut bertemu pada satu prinsip: AI memberi manfaat ketika diletakkan di bawah kendali tujuan manusia yang jelas, sumber yang dapat diperiksa, dan etika yang konsisten.

BAGIAN II - TEKNOLOGI DAN PRAKTIK PRODUKSI DAKWAH

Bagian ini mengembangkan kerangka analitis dan praktis yang saling berhubungan. Pembaca dapat menggunakan tabel, diagram, dan checklist sebagai alat kerja untuk menyesuaikan prinsip buku dengan konteks lembaganya.

BAB 5 PROMPT ENGINEERING, RAG, DAN PENELUSURAN SUMBER

Bab ini membahas prompt engineering, retrieval, basis pengetahuan, sitasi, chunking, metadata, dan pemeriksaan sumber secara manusiawi. Fokus utamanya adalah membangun kemampuan mengambil keputusan, bukan hanya mengenalkan perangkat. Dalam konteks 2026, perubahan teknologi perlu dibaca bersama perubahan sosial, kebijakan, dan ekspektasi publik. Rujukan kunci yang menopang pembahasan antara lain NIST (2024), UNESCO (2023), Stanford HAI (2026), C2PA (2025).

5.1 Prompt sebagai instruksi ilmiah yang dapat diaudit

Prompt sebagai instruksi ilmiah yang dapat diaudit perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, prompt engineering, retrieval, basis pengetahuan, sitasi, chunking, metadata, dan pemeriksaan sumber secara manusiawi saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada perpustakaan fatwa, himpunan keputusan organisasi, koleksi tafsir, artikel jurnal, dan dokumen kebijakan. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. NIST (2024) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan UNESCO (2023) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti prompt sebagai instruksi ilmiah yang dapat diaudit tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap prompt sebagai instruksi ilmiah yang dapat diaudit, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko

Stanford HAI (2026): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam prompt sebagai instruksi ilmiah yang dapat diaudit, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. C2PA (2025) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada prompt sebagai instruksi ilmiah yang dapat diaudit, risiko serupa dapat berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan prompt sebagai instruksi ilmiah yang dapat diaudit hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

5.2 Teknik konteks, peran, batasan, dan format

Teknik konteks, peran, batasan, dan format perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, prompt engineering, retrieval, basis pengetahuan, sitasi, chunking, metadata, dan pemeriksaan sumber secara manusiawi saling berkelindan sehingga keputusan

teknis dapat mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada perpustakaan fatwa, himpunan keputusan organisasi, koleksi tafsir, artikel jurnal, dan dokumen kebijakan. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. NIST (2024) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan UNESCO (2023) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti teknik konteks, peran, batasan, dan format tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap teknik konteks, peran, batasan, dan format, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko Stanford HAI (2026): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam teknik konteks, peran, batasan, dan format, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. C2PA (2025) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan

syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada teknik konteks, peran, batasan, dan format, risiko serupa dapat berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan teknik konteks, peran, batasan, dan format hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

Prinsip kerja: gunakan AI untuk memperluas kapasitas manusia dalam teknik konteks, peran, batasan, dan format, tetapi jangan mengalihkan tanggung jawab verifikasi, penilaian etis, dan keputusan akhir kepada model.

Prinsip operasional buku

5.3 Retrieval-Augmented Generation untuk dakwah

Retrieval-Augmented Generation untuk dakwah perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, prompt engineering, retrieval, basis pengetahuan, sitasi, chunking, metadata, dan pemeriksaan sumber secara manusiawi saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada perpustakaan fatwa, himpunan keputusan organisasi, koleksi tafsir, artikel jurnal, dan dokumen kebijakan. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. NIST (2024) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan UNESCO (2023) menempatkan literasi,

keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti retrieval-augmented generation untuk dakwah tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap retrieval-augmented generation untuk dakwah, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko Stanford HAI (2026): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam retrieval-augmented generation untuk dakwah, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. C2PA (2025) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada retrieval-augmented generation untuk dakwah, risiko serupa dapat berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan retrieval-augmented generation untuk dakwah hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup

ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

5.4 Sitasi, metadata, dan jejak sumber

Sitasi, metadata, dan jejak sumber perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, prompt engineering, retrieval, basis pengetahuan, sitasi, chunking, metadata, dan pemeriksaan sumber secara manusiawi saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada perpustakaan fatwa, himpunan keputusan organisasi, koleksi tafsir, artikel jurnal, dan dokumen kebijakan. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. NIST (2024) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan UNESCO (2023) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti sitasi, metadata, dan jejak sumber tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap sitasi, metadata, dan jejak sumber, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko Stanford HAI (2026): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam sitasi, metadata, dan jejak sumber, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. C2PA (2025) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada sitasi, metadata, dan jejak sumber, risiko serupa dapat berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan sitasi, metadata, dan jejak sumber hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

Prinsip kerja: gunakan AI untuk memperluas kapasitas manusia dalam sitasi, metadata, dan jejak sumber, tetapi jangan mengalihkan tanggung jawab verifikasi, penilaian etis, dan keputusan akhir kepada model.

Prinsip operasional buku

5.5 Workflow verifikasi sebelum publikasi

Workflow verifikasi sebelum publikasi perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, prompt engineering, retrieval,

basis pengetahuan, sitasi, chunking, metadata, dan pemeriksaan sumber secara manusiawi saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada perpustakaan fatwa, himpunan keputusan organisasi, koleksi tafsir, artikel jurnal, dan dokumen kebijakan. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. NIST (2024) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan UNESCO (2023) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti workflow verifikasi sebelum publikasi tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap workflow verifikasi sebelum publikasi, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko Stanford HAI (2026): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam workflow verifikasi sebelum publikasi, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. C2PA (2025) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada workflow verifikasi sebelum publikasi, risiko serupa dapat berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan workflow verifikasi sebelum publikasi hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

Tabel 5.1. Ringkasan kontrol implementasi Bab 5

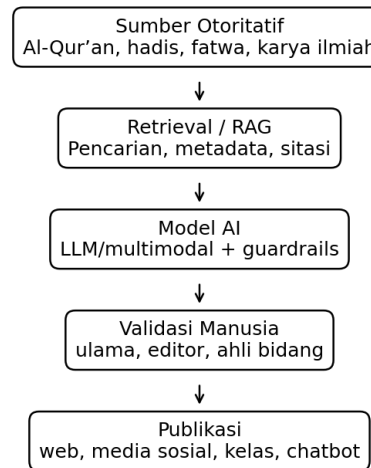
Tahap	Pertanyaan kendali	Bukti yang disimpan
Tujuan	Apa manfaat yang ingin dicapai?	brief kegiatan
Sumber	Apakah sumber dapat dilacak?	daftar referensi/URL
AI	Apa batas instruksi dan data?	prompt/log
Review	Siapa yang memeriksa?	catatan revisi
Publikasi	Apakah ada disclosure bila perlu?	versi final
Evaluasi	Apa dampak dan koreksi?	metrik + log insiden

5.6 Sintesis Bab

Inti Bab 5 adalah bahwa prompt engineering, retrieval, basis pengetahuan, sitasi, chunking, metadata, dan pemeriksaan sumber secara manusiawi harus dikelola sebagai satu sistem. Keberhasilan tidak lahir dari penggunaan AI sebanyak-banyaknya, tetapi dari kecocokan antara tujuan, sumber, kompetensi manusia, mekanisme review, dan evaluasi dampak. Organisasi yang memiliki disiplin dokumentasi akan lebih mudah memanfaatkan model baru tanpa mengulang kesalahan dasar. Sebaliknya, organisasi yang hanya mengejar kecepatan berisiko memproduksi lebih banyak konten tetapi sekaligus memperbesar kesalahan, kebingungan, dan beban koreksi.

Bagi mahasiswa dan dosen, pesan utama bab ini adalah menjaga proses berpikir dan keterlacakan sumber. Bagi mubaligh dan ustadz, pesan utamanya adalah menjaga amanah isi dan konteks. Bagi pengelola organisasi, pesan utamanya adalah membangun SOP, peran, dan mekanisme audit. Ketiga kelompok tersebut bertemu pada satu prinsip: AI memberi manfaat ketika diletakkan di bawah kendali tujuan manusia yang jelas, sumber yang dapat diperiksa, dan etika yang konsisten.

Arsitektur RAG untuk Pengetahuan Keislaman



Gambar 3. Arsitektur RAG untuk pengetahuan keislaman.

BAB 6 MENULIS NASKAH DAKWAH DAN MATERI PENDIDIKAN DENGAN AI

Bab ini membahas penulisan berbantu AI, penyuntingan, kejelasan argumen, verifikasi dalil, transparansi penggunaan AI, dan integritas akademik. Fokus utamanya adalah membangun kemampuan mengambil keputusan, bukan hanya mengenalkan perangkat. Dalam konteks 2026, perubahan teknologi perlu dibaca bersama perubahan sosial, kebijakan, dan ekspektasi publik. Rujukan kunci yang menopang pembahasan antara lain UNESCO (2023), Huda dkk. (2025), NIST (2024), OECD (2024).

6.1 Dari outline ke naskah yang koheren

Dari outline ke naskah yang koheren perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, penulisan berbantu AI, penyuntingan, kejelasan argumen, verifikasi dalil, transparansi penggunaan AI, dan integritas akademik saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada naskah khutbah Jumat, bahan kajian remaja, modul kuliah, artikel populer, FAQ masjid, dan materi pelatihan kader. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. UNESCO (2023) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan Huda dkk. (2025) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti dari outline ke naskah yang koheren tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap dari outline ke naskah yang koheren, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko NIST (2024):

risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam dari outline ke naskah yang koheren, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. OECD (2024) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada dari outline ke naskah yang koheren, risiko serupa dapat berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan dari outline ke naskah yang koheren hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

6.2 Khutbah, ceramah, artikel, dan modul

Khutbah, ceramah, artikel, dan modul perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, penulisan berbantu AI, penyuntingan, kejelasan argumen, verifikasi dalil, transparansi penggunaan AI, dan integritas akademik saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah

cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada naskah khutbah Jumat, bahan kajian remaja, modul kuliah, artikel populer, FAQ masjid, dan materi pelatihan kader. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. UNESCO (2023) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan Huda dkk. (2025) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti khutbah, ceramah, artikel, dan modul tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap khutbah, ceramah, artikel, dan modul, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko NIST (2024): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam khutbah, ceramah, artikel, dan modul, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. OECD (2024) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan

syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada khutbah, ceramah, artikel, dan modul, risiko serupa dapat berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan khutbah, ceramah, artikel, dan modul hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

Prinsip kerja: gunakan AI untuk memperluas kapasitas manusia dalam khutbah, ceramah, artikel, dan modul, tetapi jangan mengalihkan tanggung jawab verifikasi, penilaian etis, dan keputusan akhir kepada model.

Prinsip operasional buku

6.3 Menjaga akurasi dalil dan translasi

Menjaga akurasi dalil dan translasi perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, penulisan berbantu AI, penyuntingan, kejelasan argumen, verifikasi dalil, transparansi penggunaan AI, dan integritas akademik saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada naskah khutbah Jumat, bahan kajian remaja, modul kuliah, artikel populer, FAQ masjid, dan materi pelatihan kader. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. UNESCO (2023) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan Huda dkk. (2025) menempatkan literasi,

keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti menjaga akurasi dalil dan translasi tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap menjaga akurasi dalil dan translasi, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko NIST (2024): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam menjaga akurasi dalil dan translasi, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. OECD (2024) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada menjaga akurasi dalil dan translasi, risiko serupa dapat berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan menjaga akurasi dalil dan translasi hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber,

keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

6.4 Gaya bahasa untuk mahasiswa dan publik

Gaya bahasa untuk mahasiswa dan publik perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, penulisan berbantu AI, penyuntingan, kejelasan argumen, verifikasi dalil, transparansi penggunaan AI, dan integritas akademik saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada naskah khutbah Jumat, bahan kajian remaja, modul kuliah, artikel populer, FAQ masjid, dan materi pelatihan kader. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. UNESCO (2023) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan Huda dkk. (2025) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti gaya bahasa untuk mahasiswa dan publik tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap gaya bahasa untuk mahasiswa dan publik, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko NIST (2024): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam gaya bahasa untuk mahasiswa dan publik, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. OECD (2024) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada gaya bahasa untuk mahasiswa dan publik, risiko serupa dapat berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan gaya bahasa untuk mahasiswa dan publik hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

Prinsip kerja: gunakan AI untuk memperluas kapasitas manusia dalam gaya bahasa untuk mahasiswa dan publik, tetapi jangan mengalihkan tanggung jawab verifikasi, penilaian etis, dan keputusan akhir kepada model.

Prinsip operasional buku

6.5 Penyuntingan, fact-check, dan disclosure AI

Penyuntingan, fact-check, dan disclosure AI perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan

sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, penulisan berbantu AI, penyuntingan, kejelasan argumen, verifikasi dalil, transparansi penggunaan AI, dan integritas akademik saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada naskah khutbah Jumat, bahan kajian remaja, modul kuliah, artikel populer, FAQ masjid, dan materi pelatihan kader. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. UNESCO (2023) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan Huda dkk. (2025) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti penyuntingan, fact-check, dan disclosure ai tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap penyuntingan, fact-check, dan disclosure ai, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko NIST (2024): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam penyuntingan, fact-check, dan disclosure ai, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. OECD (2024) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada penyuntingan, fact-check, dan disclosure ai, risiko serupa dapat berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan penyuntingan, fact-check, dan disclosure ai hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

Tabel 6.1. Ringkasan kontrol implementasi Bab 6

Tahap	Pertanyaan kendali	Bukti yang disimpan
Tujuan	Apa manfaat yang ingin dicapai?	brief kegiatan
Sumber	Apakah sumber dapat dilacak?	daftar referensi/URL
AI	Apa batas instruksi dan data?	prompt/log
Review	Siapa yang memeriksa?	catatan revisi
Publikasi	Apakah ada disclosure bila perlu?	versi final
Evaluasi	Apa dampak dan koreksi?	metrik + log insiden

6.6 Sintesis Bab

Inti Bab 6 adalah bahwa penulisan berbantu AI, penyuntingan, kejelasan argumen, verifikasi dalil, transparansi penggunaan AI, dan integritas akademik harus dikelola sebagai satu sistem. Keberhasilan tidak lahir dari penggunaan AI sebanyak-banyaknya, tetapi dari kecocokan antara tujuan, sumber, kompetensi manusia, mekanisme review, dan evaluasi dampak. Organisasi yang memiliki disiplin dokumentasi akan lebih mudah memanfaatkan model baru tanpa mengulang kesalahan dasar. Sebaliknya, organisasi yang hanya mengejar kecepatan berisiko memproduksi lebih banyak konten tetapi sekaligus memperbesar kesalahan, kebingungan, dan beban koreksi.

Bagi mahasiswa dan dosen, pesan utama bab ini adalah menjaga proses berpikir dan keterlacakan sumber. Bagi mubaligh dan ustadz, pesan utamanya adalah menjaga amanah isi dan konteks. Bagi pengelola organisasi, pesan utamanya adalah membangun SOP, peran, dan mekanisme audit. Ketiga kelompok tersebut bertemu pada satu prinsip: AI memberi manfaat ketika diletakkan di bawah kendali tujuan manusia yang jelas, sumber yang dapat diperiksa, dan etika yang konsisten.

BAB 7 PRODUKSI AUDIO, PODCAST, DAN SUARA SINTETIS

Bab ini membahas produksi audio, transkripsi, suara sintetis, podcast, aksesibilitas, persetujuan, identitas, dan risiko impersonasi. Fokus utamanya adalah membangun kemampuan mengambil keputusan, bukan hanya mengenalkan perangkat. Dalam konteks 2026, perubahan teknologi perlu dibaca bersama perubahan sosial, kebijakan, dan ekspektasi publik. Rujukan kunci yang menopang pembahasan antara lain NIST (2024), C2PA (2025), UNESCO (2021), OECD (2024).

7.1 Desain program audio dakwah

Desain program audio dakwah perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, produksi audio, transkripsi, suara sintetis, podcast, aksesibilitas, persetujuan, identitas, dan risiko impersonasi saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada podcast kajian, transkripsi khutbah, audio ringkasan, narasi video, voice-over multibahasa, dan materi untuk tunanetra. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. NIST (2024) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan C2PA (2025) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti desain program audio dakwah tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap desain program audio dakwah, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko UNESCO (2021): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam desain program audio dakwah, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. OECD (2024) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada desain program audio dakwah, risiko serupa dapat berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan desain program audio dakwah hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

7.2 Transkripsi dan peringkasan otomatis

Transkripsi dan peringkasan otomatis perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, produksi audio, transkripsi, suara sintesis, podcast, aksesibilitas, persetujuan, identitas, dan risiko impersonasi saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada podcast kajian, transkripsi khutbah, audio ringkasan, narasi video, voice-over multibahasa, dan materi untuk tunanetra. Teknologi dapat

mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. NIST (2024) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan C2PA (2025) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti transkripsi dan peringkasan otomatis tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap transkripsi dan peringkasan otomatis, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko UNESCO (2021): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam transkripsi dan peringkasan otomatis, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. OECD (2024) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada transkripsi dan peringkasan otomatis, risiko serupa dapat berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko

tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan transkripsi dan peringkasan otomatis hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

Prinsip kerja: gunakan AI untuk memperluas kapasitas manusia dalam transkripsi dan peringkasan otomatis, tetapi jangan mengalihkan tanggung jawab verifikasi, penilaian etis, dan keputusan akhir kepada model.

Prinsip operasional buku

7.3 Text-to-speech dan voice cloning

Text-to-speech dan voice cloning perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, produksi audio, transkripsi, suara sintetis, podcast, aksesibilitas, persetujuan, identitas, dan risiko impersonasi saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada podcast kajian, transkripsi khutbah, audio ringkasan, narasi video, voice-over multibahasa, dan materi untuk tunanetra. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. NIST (2024) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan C2PA (2025) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti text-to-speech dan voice cloning tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini

penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap text-to-speech dan voice cloning, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko UNESCO (2021): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam text-to-speech dan voice cloning, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. OECD (2024) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada text-to-speech dan voice cloning, risiko serupa dapat berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan text-to-speech dan voice cloning hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan

kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

7.4 Aksesibilitas dan bahasa daerah

Aksesibilitas dan bahasa daerah perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, produksi audio, transkripsi, suara sintesis, podcast, aksesibilitas, persetujuan, identitas, dan risiko impersonasi saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada podcast kajian, transkripsi khutbah, audio ringkasan, narasi video, voice-over multibahasa, dan materi untuk tunanetra. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. NIST (2024) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan C2PA (2025) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti aksesibilitas dan bahasa daerah tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap aksesibilitas dan bahasa daerah, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko UNESCO (2021): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam aksesibilitas dan bahasa daerah, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan

tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. OECD (2024) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada aksesibilitas dan bahasa daerah, risiko serupa dapat berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan aksesibilitas dan bahasa daerah hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

Prinsip kerja: gunakan AI untuk memperluas kapasitas manusia dalam aksesibilitas dan bahasa daerah, tetapi jangan mengalihkan tanggung jawab verifikasi, penilaian etis, dan keputusan akhir kepada model.

Prinsip operasional buku

7.5 Etika persetujuan dan identitas suara

Etika persetujuan dan identitas suara perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, produksi audio, transkripsi, suara sintetis, podcast, aksesibilitas, persetujuan, identitas, dan risiko impersonasi saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh

penerapannya tampak pada podcast kajian, transkripsi khutbah, audio ringkasan, narasi video, voice-over multibahasa, dan materi untuk tunanetra. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. NIST (2024) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan C2PA (2025) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti etika persetujuan dan identitas suara tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap etika persetujuan dan identitas suara, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko UNESCO (2021): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam etika persetujuan dan identitas suara, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. OECD (2024) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada etika persetujuan dan identitas suara, risiko serupa dapat berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan

reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan etika persetujuan dan identitas suara hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

Tabel 7.1. Ringkasan kontrol implementasi Bab 7

Tingkat	Contoh penggunaan	Kontrol minimum
Rendah	ide judul, format, ringkasan non-sensitif	review editor
Sedang	draft artikel, terjemahan, materi kelas	cek sumber + review ahli
Tinggi	fatwa, konsultasi personal, isu konflik	ulama/ahli wajib, dokumentasi, eskalasi

7.6 Sintesis Bab

Inti Bab 7 adalah bahwa produksi audio, transkripsi, suara sintetis, podcast, aksesibilitas, persetujuan, identitas, dan risiko impersonasi harus dikelola sebagai satu sistem. Keberhasilan tidak lahir dari penggunaan AI sebanyak-banyaknya, tetapi dari kecocokan antara tujuan, sumber, kompetensi manusia, mekanisme review, dan evaluasi dampak. Organisasi yang memiliki disiplin dokumentasi akan lebih mudah memanfaatkan model baru tanpa mengulang kesalahan dasar. Sebaliknya, organisasi yang hanya mengejar kecepatan berisiko memproduksi lebih banyak konten tetapi sekaligus memperbesar kesalahan, kebingungan, dan beban koreksi.

Bagi mahasiswa dan dosen, pesan utama bab ini adalah menjaga proses berpikir dan keterlacakan sumber. Bagi mubaligh dan ustadz, pesan utamanya adalah menjaga amanah isi dan konteks. Bagi pengelola organisasi, pesan utamanya adalah membangun SOP, peran, dan mekanisme audit. Ketiga kelompok tersebut bertemu pada satu prinsip: AI memberi manfaat ketika diletakkan di bawah kendali tujuan manusia yang jelas, sumber yang dapat diperiksa, dan etika yang konsisten.

BAB 8 GAMBAR, VIDEO, AVATAR, DAN MEDIA SINTETIS

Bab ini membahas visual generatif, video sintesis, avatar, deepfake, provenance, label konten sintetis, dan perlindungan reputasi. Fokus utamanya adalah membangun kemampuan mengambil keputusan, bukan hanya mengenalkan perangkat. Dalam konteks 2026, perubahan teknologi perlu dibaca bersama perubahan sosial, kebijakan, dan ekspektasi publik. Rujukan kunci yang menopang pembahasan antara lain C2PA (2025), NIST (2024), Komdigi (2026), EU AI Act (2024/2026).

8.1 Visual dakwah sebagai media penjelasan

Visual dakwah sebagai media penjelasan perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, visual generatif, video sintesis, avatar, deepfake, provenance, label konten sintetis, dan perlindungan reputasi saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada poster kajian, infografik, video pendek, avatar edukasi, ilustrasi konsep, dan konten dokumenter. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. C2PA (2025) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan NIST (2024) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti visual dakwah sebagai media penjelasan tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap visual dakwah sebagai media penjelasan, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko Komdigi (2026): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak,

lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam visual dakwah sebagai media penjelasan, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. EU AI Act (2024/2026) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada visual dakwah sebagai media penjelasan, risiko serupa dapat berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan visual dakwah sebagai media penjelasan hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

8.2 Generasi gambar dan ilustrasi yang bertanggung jawab

Generasi gambar dan ilustrasi yang bertanggung jawab perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, visual generatif, video sintesis, avatar, deepfake, provenance, label konten sintetis, dan perlindungan reputasi saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari

tujuan dakwah yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada poster kajian, infografik, video pendek, avatar edukasi, ilustrasi konsep, dan konten dokumenter. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. C2PA (2025) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan NIST (2024) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti generasi gambar dan ilustrasi yang bertanggung jawab tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap generasi gambar dan ilustrasi yang bertanggung jawab, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko Komdigi (2026): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam generasi gambar dan ilustrasi yang bertanggung jawab, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. EU AI Act (2024/2026) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada generasi gambar dan ilustrasi yang bertanggung jawab, risiko

serupa dapat berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan generasi gambar dan ilustrasi yang bertanggung jawab hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

Prinsip kerja: gunakan AI untuk memperluas kapasitas manusia dalam generasi gambar dan ilustrasi yang bertanggung jawab, tetapi jangan mengalihkan tanggung jawab verifikasi, penilaian etis, dan keputusan akhir kepada model.

Prinsip operasional buku

8.3 Video otomatis dan avatar presenter

Video otomatis dan avatar presenter perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, visual generatif, video sintesis, avatar, deepfake, provenance, label konten sintetis, dan perlindungan reputasi saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada poster kajian, infografik, video pendek, avatar edukasi, ilustrasi konsep, dan konten dokumenter. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. C2PA (2025) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan NIST (2024) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti video otomatis dan avatar presenter tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan

budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap video otomatis dan avatar presenter, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko Komdigi (2026): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam video otomatis dan avatar presenter, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. EU AI Act (2024/2026) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada video otomatis dan avatar presenter, risiko serupa dapat berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan video otomatis dan avatar presenter hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa

menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

8.4 Deepfake, manipulasi, dan autentisitas

Deepfake, manipulasi, dan autentisitas perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, visual generatif, video sintesis, avatar, deepfake, provenance, label konten sintetis, dan perlindungan reputasi saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada poster kajian, infografik, video pendek, avatar edukasi, ilustrasi konsep, dan konten dokumenter. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. C2PA (2025) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan NIST (2024) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti deepfake, manipulasi, dan autentisitas tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap deepfake, manipulasi, dan autentisitas, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko Komdigi (2026): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan

konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam deepfake, manipulasi, dan autentisitas, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. EU AI Act (2024/2026) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada deepfake, manipulasi, dan autentisitas, risiko serupa dapat berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan deepfake, manipulasi, dan autentisitas hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

Prinsip kerja: gunakan AI untuk memperluas kapasitas manusia dalam deepfake, manipulasi, dan autentisitas, tetapi jangan mengalihkan tanggung jawab verifikasi, penilaian etis, dan keputusan akhir kepada model.

Prinsip operasional buku

8.5 Content Credentials dan provenance

Content Credentials dan provenance perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, visual generatif, video sintesis, avatar, deepfake, provenance, label konten sintetis, dan perlindungan reputasi saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima.

Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada poster kajian, infografik, video pendek, avatar edukasi, ilustrasi konsep, dan konten dokumenter. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. C2PA (2025) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan NIST (2024) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti content credentials dan provenance tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap content credentials dan provenance, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko Komdigi (2026): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam content credentials dan provenance, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. EU AI Act (2024/2026) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah

nuansa bahasa. Pada content credentials dan provenance, risiko serupa dapat berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan content credentials dan provenance hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

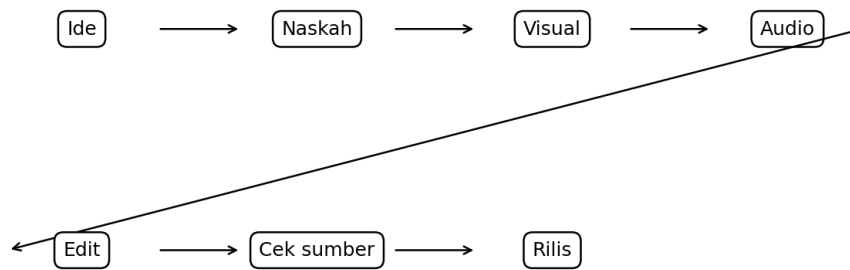
Tabel 8.1. Ringkasan kontrol implementasi Bab 8

Tingkat	Contoh penggunaan	Kontrol minimum
Rendah	ide judul, format, ringkasan non-sensitif	review editor
Sedang	draft artikel, terjemahan, materi kelas	cek sumber + review ahli
Tinggi	fatwa, konsultasi personal, isu konflik	ulama/ahli wajib, dokumentasi, eskalasi

8.6 Sintesis Bab

Inti Bab 8 adalah bahwa visual generatif, video sintesis, avatar, deepfake, provenance, label konten sintetis, dan perlindungan reputasi harus dikelola sebagai satu sistem. Keberhasilan tidak lahir dari penggunaan AI sebanyak-banyaknya, tetapi dari kecocokan antara tujuan, sumber, kompetensi manusia, mekanisme review, dan evaluasi dampak. Organisasi yang memiliki disiplin dokumentasi akan lebih mudah memanfaatkan model baru tanpa mengulang kesalahan dasar. Sebaliknya, organisasi yang hanya mengejar kecepatan berisiko memproduksi lebih banyak konten tetapi sekaligus memperbesar kesalahan, kebingungan, dan beban koreksi.

Bagi mahasiswa dan dosen, pesan utama bab ini adalah menjaga proses berpikir dan keterlacakan sumber. Bagi mubaligh dan ustadz, pesan utamanya adalah menjaga amanah isi dan konteks. Bagi pengelola organisasi, pesan utamanya adalah membangun SOP, peran, dan mekanisme audit. Ketiga kelompok tersebut bertemu pada satu prinsip: AI memberi manfaat ketika diletakkan di bawah kendali tujuan manusia yang jelas, sumber yang dapat diperiksa, dan etika yang konsisten.

Pipeline Produksi Konten Multimodal

Gambar 4. Pipeline produksi konten multimodal.

BAB 9 MEDIA SOSIAL, ALGORITMA, DAN STRATEGI DISTRIBUSI

Bab ini membahas algoritma rekomendasi, strategi distribusi, keterlihatan konten, retensi audiens, integritas informasi, dan orkestrasi kanal. Fokus utamanya adalah membangun kemampuan mengambil keputusan, bukan hanya mengenalkan perangkat. Dalam konteks 2026, perubahan teknologi perlu dibaca bersama perubahan sosial, kebijakan, dan ekspektasi publik. Rujukan kunci yang menopang pembahasan antara lain Bunt (2018), Setiawan dkk. (2022), OECD (2024), Komdigi (2026).

9.1 Cara kerja rekomendasi secara konseptual

Cara kerja rekomendasi secara konseptual perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, algoritma rekomendasi, strategi distribusi, keterlihatan konten, retensi audiens, integritas informasi, dan orkestrasi kanal saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, podcast, website, newsletter, dan mesin pencari. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. Bunt (2018) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan Setiawan dkk. (2022) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti cara kerja rekomendasi secara konseptual tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap cara kerja rekomendasi secara konseptual, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko OECD (2024): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak,

lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam cara kerja rekomendasi secara konseptual, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. Komdigi (2026) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada cara kerja rekomendasi secara konseptual, risiko serupa dapat berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan cara kerja rekomendasi secara konseptual hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

9.2 Strategi format lintas platform

Strategi format lintas platform perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, algoritma rekomendasi, strategi distribusi, keterlihatan konten, retensi audiens, integritas informasi, dan orkestrasi kanal saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang

jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, podcast, website, newsletter, dan mesin pencari. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. Bunt (2018) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan Setiawan dkk. (2022) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti strategi format lintas platform tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap strategi format lintas platform, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko OECD (2024): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam strategi format lintas platform, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. Komdigi (2026) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada strategi format lintas platform, risiko serupa dapat berkembang

menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan strategi format lintas platform hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

Prinsip kerja: gunakan AI untuk memperluas kapasitas manusia dalam strategi format lintas platform, tetapi jangan mengalihkan tanggung jawab verifikasi, penilaian etis, dan keputusan akhir kepada model.

Prinsip operasional buku

9.3 SEO, pencarian, dan discoverability

SEO, pencarian, dan discoverability perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, algoritma rekomendasi, strategi distribusi, keterlihatan konten, retensi audiens, integritas informasi, dan orkestrasi kanal saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, podcast, website, newsletter, dan mesin pencari. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. Bunt (2018) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan Setiawan dkk. (2022) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti seo, pencarian, dan discoverability tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan

keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap seo, pencarian, dan discoverability, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko OECD (2024): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam seo, pencarian, dan discoverability, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. Komdigi (2026) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada seo, pencarian, dan discoverability, risiko serupa dapat berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan seo, pencarian, dan discoverability hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat

proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

9.4 Menghindari jebakan clickbait dan polarisasi

Menghindari jebakan clickbait dan polarisasi perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, algoritma rekomendasi, strategi distribusi, keterlihatan konten, retensi audiens, integritas informasi, dan orkestrasi kanal saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, podcast, website, newsletter, dan mesin pencari. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. Bunt (2018) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan Setiawan dkk. (2022) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti menghindari jebakan clickbait dan polarisasi tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap menghindari jebakan clickbait dan polarisasi, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko OECD (2024): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam

menghindari jebakan clickbait dan polarisasi, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. Komdigi (2026) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada menghindari jebakan clickbait dan polarisasi, risiko serupa dapat berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan menghindari jebakan clickbait dan polarisasi hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

Prinsip kerja: gunakan AI untuk memperluas kapasitas manusia dalam menghindari jebakan clickbait dan polarisasi, tetapi jangan mengalihkan tanggung jawab verifikasi, penilaian etis, dan keputusan akhir kepada model.

Prinsip operasional buku

9.5 Kalender editorial dan orkestrasi kanal

Kalender editorial dan orkestrasi kanal perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, algoritma rekomendasi, strategi distribusi, keterlihatan konten, retensi audiens, integritas informasi, dan orkestrasi kanal saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang

jasas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, podcast, website, newsletter, dan mesin pencari. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. Bunt (2018) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan Setiawan dkk. (2022) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti kalender editorial dan orkestrasi kanal tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap kalender editorial dan orkestrasi kanal, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko OECD (2024): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam kalender editorial dan orkestrasi kanal, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. Komdigi (2026) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada kalender editorial dan orkestrasi kanal, risiko serupa dapat

berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan kalender editorial dan orkestrasi kanal hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

Tabel 9.1. Ringkasan kontrol implementasi Bab 9

Tahap	Pertanyaan kendali	Bukti yang disimpan
Tujuan	Apa manfaat yang ingin dicapai?	brief kegiatan
Sumber	Apakah sumber dapat dilacak?	daftar referensi/URL
AI	Apa batas instruksi dan data?	prompt/log
Review	Siapa yang memeriksa?	catatan revisi
Publikasi	Apakah ada disclosure bila perlu?	versi final
Evaluasi	Apa dampak dan koreksi?	metrik + log insiden

9.6 Sintesis Bab

Inti Bab 9 adalah bahwa algoritma rekomendasi, strategi distribusi, keterlihatan konten, retensi audiens, integritas informasi, dan orkestrasi kanal harus dikelola sebagai satu sistem. Keberhasilan tidak lahir dari penggunaan AI sebanyak-banyaknya, tetapi dari kecocokan antara tujuan, sumber, kompetensi manusia, mekanisme review, dan evaluasi dampak. Organisasi yang memiliki disiplin dokumentasi akan lebih mudah memanfaatkan model baru tanpa mengulang kesalahan dasar. Sebaliknya, organisasi yang hanya mengejar kecepatan berisiko memproduksi lebih banyak konten tetapi sekaligus memperbesar kesalahan, kebingungan, dan beban koreksi.

Bagi mahasiswa dan dosen, pesan utama bab ini adalah menjaga proses berpikir dan keterlacakan sumber. Bagi mubaligh dan ustadz, pesan utamanya adalah menjaga amanah isi dan konteks. Bagi pengelola organisasi, pesan utamanya adalah membangun SOP, peran, dan mekanisme audit. Ketiga kelompok tersebut bertemu

pada satu prinsip: AI memberi manfaat ketika diletakkan di bawah kendali tujuan manusia yang jelas, sumber yang dapat diperiksa, dan etika yang konsisten.

BAB 10 CHATBOT, ASISTEN VIRTUAL, DAN AGENTIC AI UNTUK DAKWAH

Bab ini membahas chatbot, agen AI, guardrails, human escalation, tool use, audit log, dan pengujian pengetahuan keislaman. Fokus utamanya adalah membangun kemampuan mengambil keputusan, bukan hanya mengenalkan perangkat. Dalam konteks 2026, perubahan teknologi perlu dibaca bersama perubahan sosial, kebijakan, dan ekspektasi publik. Rujukan kunci yang menopang pembahasan antara lain NIST (2024), Stanford HAI (2026), Marwantika & Dauda (2025), Fatimah dkk. (2026).

10.1 Use case chatbot keislaman

Use case chatbot keislaman perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, chatbot, agen AI, guardrails, human escalation, tool use, audit log, dan pengujian pengetahuan keislaman saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada chatbot FAQ masjid, asisten perpustakaan, agen penyusun ringkasan, bot registrasi kegiatan, dan triase pertanyaan ke ustadz. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. NIST (2024) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan Stanford HAI (2026) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti use case chatbot keislaman tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap use case chatbot keislaman, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko Marwantika &

Dauda (2025): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam use case chatbot keislaman, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. Fatimah dkk. (2026) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada use case chatbot keislaman, risiko serupa dapat berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan use case chatbot keislaman hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

10.2 Desain basis pengetahuan dan guardrails

Desain basis pengetahuan dan guardrails perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, chatbot, agen AI, guardrails, human escalation, tool use, audit log, dan pengujian pengetahuan keislaman saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah

yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada chatbot FAQ masjid, asisten perpustakaan, agen penyusun ringkasan, bot registrasi kegiatan, dan triase pertanyaan ke ustadz. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. NIST (2024) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan Stanford HAI (2026) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti desain basis pengetahuan dan guardrails tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap desain basis pengetahuan dan guardrails, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko Marwantika & Dauda (2025): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam desain basis pengetahuan dan guardrails, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. Fatimah dkk. (2026) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah

nuansa bahasa. Pada desain basis pengetahuan dan guardrails, risiko serupa dapat berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan desain basis pengetahuan dan guardrails hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

Prinsip kerja: gunakan AI untuk memperluas kapasitas manusia dalam desain basis pengetahuan dan guardrails, tetapi jangan mengalihkan tanggung jawab verifikasi, penilaian etis, dan keputusan akhir kepada model.

Prinsip operasional buku

10.3 Eskalasi pertanyaan sensitif kepada manusia

Eskalasi pertanyaan sensitif kepada manusia perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, chatbot, agen AI, guardrails, human escalation, tool use, audit log, dan pengujian pengetahuan keislaman saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada chatbot FAQ masjid, asisten perpustakaan, agen penyusun ringkasan, bot registrasi kegiatan, dan triase pertanyaan ke ustadz. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. NIST (2024) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan Stanford HAI (2026) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan

yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti eskalasi pertanyaan sensitif kepada manusia tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap eskalasi pertanyaan sensitif kepada manusia, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko Marwantika & Dauda (2025): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam eskalasi pertanyaan sensitif kepada manusia, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. Fatimah dkk. (2026) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada eskalasi pertanyaan sensitif kepada manusia, risiko serupa dapat berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan eskalasi pertanyaan sensitif kepada manusia hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup

ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

10.4 Agen AI untuk administrasi dan riset

Agen AI untuk administrasi dan riset perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, chatbot, agen AI, guardrails, human escalation, tool use, audit log, dan pengujian pengetahuan keislaman saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada chatbot FAQ masjid, asisten perpustakaan, agen penyusun ringkasan, bot registrasi kegiatan, dan triase pertanyaan ke ustadz. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. NIST (2024) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan Stanford HAI (2026) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti agen ai untuk administrasi dan riset tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap agen ai untuk administrasi dan riset, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko Marwantika & Dauda (2025): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam agen ai untuk administrasi dan riset, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. Fatimah dkk. (2026) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada agen ai untuk administrasi dan riset, risiko serupa dapat berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan agen ai untuk administrasi dan riset hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

Prinsip kerja: gunakan AI untuk memperluas kapasitas manusia dalam agen ai untuk administrasi dan riset, tetapi jangan mengalihkan tanggung jawab verifikasi, penilaian etis, dan keputusan akhir kepada model.

Prinsip operasional buku

10.5 Pengujian kualitas, keamanan, dan audit log

Pengujian kualitas, keamanan, dan audit log perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan

sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, chatbot, agen AI, guardrails, human escalation, tool use, audit log, dan pengujian pengetahuan keislaman saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada chatbot FAQ masjid, asisten perpustakaan, agen penyusun ringkasan, bot registrasi kegiatan, dan triase pertanyaan ke ustadz. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. NIST (2024) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan Stanford HAI (2026) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti pengujian kualitas, keamanan, dan audit log tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap pengujian kualitas, keamanan, dan audit log, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko Marwantika & Dauda (2025): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam pengujian kualitas, keamanan, dan audit log, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. Fatimah dkk. (2026) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada pengujian kualitas, keamanan, dan audit log, risiko serupa dapat berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan pengujian kualitas, keamanan, dan audit log hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

Tabel 10.1. Ringkasan kontrol implementasi Bab 10

Tingkat	Contoh penggunaan	Kontrol minimum
Rendah	ide judul, format, ringkasan non-sensitif	review editor
Sedang	draft artikel, terjemahan, materi kelas	cek sumber + review ahli
Tinggi	fatwa, konsultasi personal, isu konflik	ulama/ahli wajib, dokumentasi, eskalasi

10.6 Sintesis Bab

Inti Bab 10 adalah bahwa chatbot, agen AI, guardrails, human escalation, tool use, audit log, dan pengujian pengetahuan keislaman harus dikelola sebagai satu sistem. Keberhasilan tidak lahir dari penggunaan AI sebanyak-banyaknya, tetapi dari kecocokan antara tujuan, sumber, kompetensi manusia, mekanisme review, dan evaluasi dampak. Organisasi yang memiliki disiplin dokumentasi akan lebih mudah memanfaatkan model baru tanpa mengulang kesalahan dasar. Sebaliknya, organisasi yang hanya mengejar kecepatan berisiko memproduksi lebih banyak konten tetapi sekaligus memperbesar kesalahan, kebingungan, dan beban koreksi.

Bagi mahasiswa dan dosen, pesan utama bab ini adalah menjaga proses berpikir dan keterlacakan sumber. Bagi mubaligh dan ustadz, pesan utamanya adalah menjaga amanah isi dan konteks. Bagi pengelola organisasi, pesan utamanya adalah membangun SOP, peran, dan mekanisme audit. Ketiga kelompok tersebut bertemu

pada satu prinsip: AI memberi manfaat ketika diletakkan di bawah kendali tujuan manusia yang jelas, sumber yang dapat diperiksa, dan etika yang konsisten.

BAGIAN III - ETIKA, TABAYYUN, DAN TATA KELOLA

Bagian ini mengembangkan kerangka analitis dan praktis yang saling berhubungan. Pembaca dapat menggunakan tabel, diagram, dan checklist sebagai alat kerja untuk menyesuaikan prinsip buku dengan konteks lembaganya.

BAB 11 TABAYYUN DIGITAL: HALUSINASI, MISINFORMASI, DAN VERIFIKASI

Bab ini membahas verifikasi informasi, halusinasi model, fact-checking, koreksi publik, kredibilitas, dan budaya audit sumber. Fokus utamanya adalah membangun kemampuan mengambil keputusan, bukan hanya mengenalkan perangkat. Dalam konteks 2026, perubahan teknologi perlu dibaca bersama perubahan sosial, kebijakan, dan ekspektasi publik. Rujukan kunci yang menopang pembahasan antara lain NIST (2024), UNESCO (2021), OECD (2024), Komdigi (2026).

11.1 Tabayyun sebagai prinsip kerja informasi

Tabayyun sebagai prinsip kerja informasi perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, verifikasi informasi, halusinasi model, fact-checking, koreksi publik, kredibilitas, dan budaya audit sumber saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada kutipan hadis, angka statistik, nama tokoh, kronologi sejarah, hasil penelitian, dan klaim kesehatan atau ekonomi. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. NIST (2024) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan UNESCO (2021) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti tabayyun sebagai prinsip kerja informasi tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap tabayyun sebagai prinsip kerja informasi, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko OECD (2024): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan

dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam tabayyun sebagai prinsip kerja informasi, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. Komdigi (2026) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada tabayyun sebagai prinsip kerja informasi, risiko serupa dapat berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan tabayyun sebagai prinsip kerja informasi hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

11.2 Jenis halusinasi pada model generatif

Jenis halusinasi pada model generatif perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, verifikasi informasi, halusinasi model, fact-checking, koreksi publik, kredibilitas, dan budaya audit sumber saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang jelas,

identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada kutipan hadis, angka statistik, nama tokoh, kronologi sejarah, hasil penelitian, dan klaim kesehatan atau ekonomi. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. NIST (2024) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan UNESCO (2021) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti jenis halusinasi pada model generatif tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap jenis halusinasi pada model generatif, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko OECD (2024): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam jenis halusinasi pada model generatif, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. Komdigi (2026) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada jenis halusinasi pada model generatif, risiko serupa dapat

berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan jenis halusinasi pada model generatif hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

Prinsip kerja: gunakan AI untuk memperluas kapasitas manusia dalam jenis halusinasi pada model generatif, tetapi jangan mengalihkan tanggung jawab verifikasi, penilaian etis, dan keputusan akhir kepada model.

Prinsip operasional buku

11.3 Verifikasi ayat, hadis, sejarah, dan statistik

Verifikasi ayat, hadis, sejarah, dan statistik perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, verifikasi informasi, halusinasi model, fact-checking, koreksi publik, kredibilitas, dan budaya audit sumber saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada kutipan hadis, angka statistik, nama tokoh, kronologi sejarah, hasil penelitian, dan klaim kesehatan atau ekonomi. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. NIST (2024) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan UNESCO (2021) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti verifikasi ayat, hadis, sejarah, dan statistik tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan

dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap verifikasi ayat, hadis, sejarah, dan statistik, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko OECD (2024): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam verifikasi ayat, hadis, sejarah, dan statistik, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. Komdigi (2026) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada verifikasi ayat, hadis, sejarah, dan statistik, risiko serupa dapat berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan verifikasi ayat, hadis, sejarah, dan statistik hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa

menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

11.4 Membangun checklist editorial

Membangun checklist editorial perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, verifikasi informasi, halusinasi model, fact-checking, koreksi publik, kredibilitas, dan budaya audit sumber saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada kutipan hadis, angka statistik, nama tokoh, kronologi sejarah, hasil penelitian, dan klaim kesehatan atau ekonomi. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. NIST (2024) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan UNESCO (2021) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti membangun checklist editorial tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap membangun checklist editorial, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko OECD (2024): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan

konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam membangun checklist editorial, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. Komdigi (2026) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada membangun checklist editorial, risiko serupa dapat berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan membangun checklist editorial hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

Prinsip kerja: gunakan AI untuk memperluas kapasitas manusia dalam membangun checklist editorial, tetapi jangan mengalihkan tanggung jawab verifikasi, penilaian etis, dan keputusan akhir kepada model.

Prinsip operasional buku

11.5 Respons koreksi dan transparansi kesalahan

Respons koreksi dan transparansi kesalahan perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, verifikasi informasi, halusinasi model, fact-checking, koreksi publik, kredibilitas, dan budaya audit sumber saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara

pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada kutipan hadis, angka statistik, nama tokoh, kronologi sejarah, hasil penelitian, dan klaim kesehatan atau ekonomi. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. NIST (2024) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan UNESCO (2021) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti respons koreksi dan transparansi kesalahan tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap respons koreksi dan transparansi kesalahan, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko OECD (2024): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam respons koreksi dan transparansi kesalahan, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. Komdigi (2026) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah

nuansa bahasa. Pada respons koreksi dan transparansi kesalahan, risiko serupa dapat berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan respons koreksi dan transparansi kesalahan hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

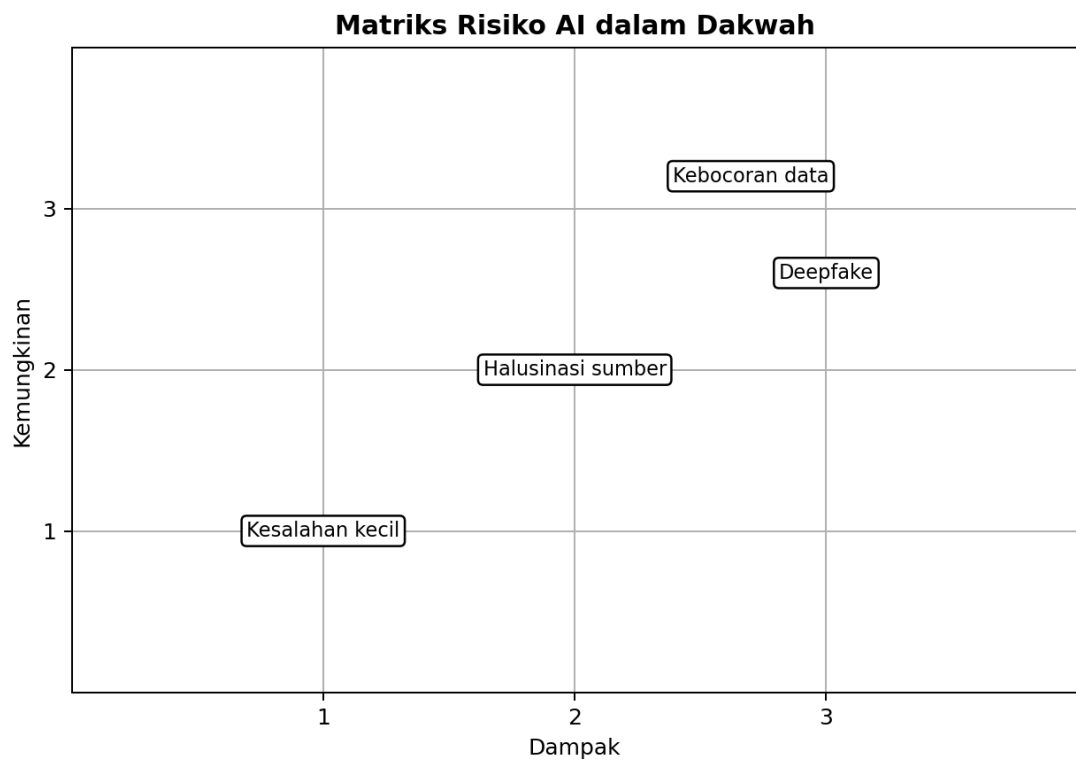
Tabel 11.1. Ringkasan kontrol implementasi Bab 11

Tingkat	Contoh penggunaan	Kontrol minimum
Rendah	ide judul, format, ringkasan non-sensitif	review editor
Sedang	draft artikel, terjemahan, materi kelas	cek sumber + review ahli
Tinggi	fatwa, konsultasi personal, isu konflik	ulama/ahli wajib, dokumentasi, eskalasi

11.6 Sintesis Bab

Inti Bab 11 adalah bahwa verifikasi informasi, halusinasi model, fact-checking, koreksi publik, kredibilitas, dan budaya audit sumber harus dikelola sebagai satu sistem. Keberhasilan tidak lahir dari penggunaan AI sebanyak-banyaknya, tetapi dari kecocokan antara tujuan, sumber, kompetensi manusia, mekanisme review, dan evaluasi dampak. Organisasi yang memiliki disiplin dokumentasi akan lebih mudah memanfaatkan model baru tanpa mengulang kesalahan dasar. Sebaliknya, organisasi yang hanya mengejar kecepatan berisiko memproduksi lebih banyak konten tetapi sekaligus memperbesar kesalahan, kebingungan, dan beban koreksi.

Bagi mahasiswa dan dosen, pesan utama bab ini adalah menjaga proses berpikir dan keterlacakan sumber. Bagi mubaligh dan ustadz, pesan utamanya adalah menjaga amanah isi dan konteks. Bagi pengelola organisasi, pesan utamanya adalah membangun SOP, peran, dan mekanisme audit. Ketiga kelompok tersebut bertemu pada satu prinsip: AI memberi manfaat ketika diletakkan di bawah kendali tujuan manusia yang jelas, sumber yang dapat diperiksa, dan etika yang konsisten.



Gambar 5. Matriks risiko AI dalam dakwah.

BAB 12 PRIVASI, DATA, KEAMANAN SIBER, DAN HAK CIPTA

Bab ini membahas privasi, perlindungan data, keamanan siber, hak cipta, kontrol akses, retensi data, dan kebijakan organisasi. Fokus utamanya adalah membangun kemampuan mengambil keputusan, bukan hanya mengenalkan perangkat. Dalam konteks 2026, perubahan teknologi perlu dibaca bersama perubahan sosial, kebijakan, dan ekspektasi publik. Rujukan kunci yang menopang pembahasan antara lain NIST (2024), OECD (2024), EU AI Act (2024/2026), Komdigi (2025-2026).

12.1 Data pribadi dalam kegiatan dakwah

Data pribadi dalam kegiatan dakwah perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, privasi, perlindungan data, keamanan siber, hak cipta, kontrol akses, retensi data, dan kebijakan organisasi saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada daftar jamaah, nomor telepon, alamat email, rekaman konsultasi, dokumen internal, serta materi berhak cipta. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. NIST (2024) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan OECD (2024) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti data pribadi dalam kegiatan dakwah tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap data pribadi dalam kegiatan dakwah, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko EU AI Act (2024/2026): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu

dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam data pribadi dalam kegiatan dakwah, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. Komdigi (2025-2026) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada data pribadi dalam kegiatan dakwah, risiko serupa dapat berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan data pribadi dalam kegiatan dakwah hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

12.2 Minimisasi data dan kontrol akses

Minimisasi data dan kontrol akses perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, privasi, perlindungan data, keamanan siber, hak cipta, kontrol akses, retensi data, dan kebijakan organisasi saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang jelas,

identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada daftar jamaah, nomor telepon, alamat email, rekaman konsultasi, dokumen internal, serta materi berhak cipta. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. NIST (2024) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan OECD (2024) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti minimisasi data dan kontrol akses tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap minimisasi data dan kontrol akses, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko EU AI Act (2024/2026): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam minimisasi data dan kontrol akses, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. Komdigi (2025-2026) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada minimisasi data dan kontrol akses, risiko serupa dapat

berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan minimisasi data dan kontrol akses hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

Prinsip kerja: gunakan AI untuk memperluas kapasitas manusia dalam minimisasi data dan kontrol akses, tetapi jangan mengalihkan tanggung jawab verifikasi, penilaian etis, dan keputusan akhir kepada model.

Prinsip operasional buku

12.3 Keamanan akun, prompt, dan dokumen

Keamanan akun, prompt, dan dokumen perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, privasi, perlindungan data, keamanan siber, hak cipta, kontrol akses, retensi data, dan kebijakan organisasi saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada daftar jamaah, nomor telepon, alamat email, rekaman konsultasi, dokumen internal, serta materi berhak cipta. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. NIST (2024) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan OECD (2024) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti keamanan akun, prompt, dan dokumen tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan

dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap keamanan akun, prompt, dan dokumen, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko EU AI Act (2024/2026): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam keamanan akun, prompt, dan dokumen, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. Komdigi (2025-2026) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada keamanan akun, prompt, dan dokumen, risiko serupa dapat berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan keamanan akun, prompt, dan dokumen hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa

menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

12.4 Hak cipta dan materi berlisensi

Hak cipta dan materi berlisensi perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, privasi, perlindungan data, keamanan siber, hak cipta, kontrol akses, retensi data, dan kebijakan organisasi saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada daftar jamaah, nomor telepon, alamat email, rekaman konsultasi, dokumen internal, serta materi berhak cipta. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. NIST (2024) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan OECD (2024) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti hak cipta dan materi berlisensi tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap hak cipta dan materi berlisensi, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko EU AI Act (2024/2026): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan

konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam hak cipta dan materi berlisensi, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. Komdigi (2025-2026) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada hak cipta dan materi berlisensi, risiko serupa dapat berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan hak cipta dan materi berlisensi hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

Prinsip kerja: gunakan AI untuk memperluas kapasitas manusia dalam hak cipta dan materi berlisensi, tetapi jangan mengalihkan tanggung jawab verifikasi, penilaian etis, dan keputusan akhir kepada model.

Prinsip operasional buku

12.5 Kebijakan internal penggunaan AI

Kebijakan internal penggunaan AI perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, privasi, perlindungan data, keamanan siber, hak cipta, kontrol akses, retensi data, dan kebijakan organisasi saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang jelas,

identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada daftar jamaah, nomor telepon, alamat email, rekaman konsultasi, dokumen internal, serta materi berhak cipta. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. NIST (2024) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan OECD (2024) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti kebijakan internal penggunaan ai tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap kebijakan internal penggunaan ai, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko EU AI Act (2024/2026): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam kebijakan internal penggunaan ai, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. Komdigi (2025-2026) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada kebijakan internal penggunaan ai, risiko serupa dapat

berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan kebijakan internal penggunaan AI hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

Tabel 12.1. Ringkasan kontrol implementasi Bab 12

Tingkat	Contoh penggunaan	Kontrol minimum
Rendah	ide judul, format, ringkasan non-sensitif	review editor
Sedang	draft artikel, terjemahan, materi kelas	cek sumber + review ahli
Tinggi	fatwa, konsultasi personal, isu konflik	ulama/ahli wajib, dokumentasi, eskalasi

12.6 Sintesis Bab

Inti Bab 12 adalah bahwa privasi, perlindungan data, keamanan siber, hak cipta, kontrol akses, retensi data, dan kebijakan organisasi harus dikelola sebagai satu sistem. Keberhasilan tidak lahir dari penggunaan AI sebanyak-banyaknya, tetapi dari kecocokan antara tujuan, sumber, kompetensi manusia, mekanisme review, dan evaluasi dampak. Organisasi yang memiliki disiplin dokumentasi akan lebih mudah memanfaatkan model baru tanpa mengulang kesalahan dasar. Sebaliknya, organisasi yang hanya mengejar kecepatan berisiko memproduksi lebih banyak konten tetapi sekaligus memperbesar kesalahan, kebingungan, dan beban koreksi.

Bagi mahasiswa dan dosen, pesan utama bab ini adalah menjaga proses berpikir dan keterlacakan sumber. Bagi mubaligh dan ustadz, pesan utamanya adalah menjaga amanah isi dan konteks. Bagi pengelola organisasi, pesan utamanya adalah membangun SOP, peran, dan mekanisme audit. Ketiga kelompok tersebut bertemu pada satu prinsip: AI memberi manfaat ketika diletakkan di bawah kendali tujuan manusia yang jelas, sumber yang dapat diperiksa, dan etika yang konsisten.

BAB 13 BIAS, KEADILAN, MODERASI, DAN RISIKO POLARISASI

Bab ini membahas bias, fairness, pluralitas tradisi keislaman, moderasi konten, polarisasi, dan representasi kelompok. Fokus utamanya adalah membangun kemampuan mengambil keputusan, bukan hanya mengenalkan perangkat. Dalam konteks 2026, perubahan teknologi perlu dibaca bersama perubahan sosial, kebijakan, dan ekspektasi publik. Rujukan kunci yang menopang pembahasan antara lain Elmahjub (2023), Marwantika & Dauda (2025), UNESCO (2021), NIST (2024).

13.1 Bias data dan bias representasi

Bias data dan bias representasi perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, bias, fairness, pluralitas tradisi keislaman, moderasi konten, polarisasi, dan representasi kelompok saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada perbedaan mazhab, isu gender, kelompok minoritas, pilihan bahasa, representasi wilayah, dan konflik sosial. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. Elmahjub (2023) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan Marwantika & Dauda (2025) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti bias data dan bias representasi tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap bias data dan bias representasi, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko UNESCO (2021): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu

dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam bias data dan bias representasi, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. NIST (2024) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada bias data dan bias representasi, risiko serupa dapat berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan bias data dan bias representasi hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

13.2 Sensitivitas mazhab dan keragaman tradisi

Sensitivitas mazhab dan keragaman tradisi perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, bias, fairness, pluralitas tradisi keislaman, moderasi konten, polarisasi, dan representasi kelompok saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang jelas,

identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada perbedaan mazhab, isu gender, kelompok minoritas, pilihan bahasa, representasi wilayah, dan konflik sosial. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. Elmahjub (2023) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan Marwantika & Dauda (2025) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti sensitivitas mazhab dan keragaman tradisi tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap sensitivitas mazhab dan keragaman tradisi, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko UNESCO (2021): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam sensitivitas mazhab dan keragaman tradisi, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. NIST (2024) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada sensitivitas mazhab dan keragaman tradisi, risiko serupa dapat

berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan sensitivitas mazhab dan keragaman tradisi hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

Prinsip kerja: gunakan AI untuk memperluas kapasitas manusia dalam sensitivitas mazhab dan keragaman tradisi, tetapi jangan mengalihkan tanggung jawab verifikasi, penilaian etis, dan keputusan akhir kepada model.

Prinsip operasional buku

13.3 Algoritma amplifikasi dan echo chamber

Algoritma amplifikasi dan echo chamber perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, bias, fairness, pluralitas tradisi keislaman, moderasi konten, polarisasi, dan representasi kelompok saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada perbedaan mazhab, isu gender, kelompok minoritas, pilihan bahasa, representasi wilayah, dan konflik sosial. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. Elmahjub (2023) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan Marwantika & Dauda (2025) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti algoritma amplifikasi dan echo chamber tidak cukup dibahas sebagai soal

perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap algoritma amplifikasi dan echo chamber, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko UNESCO (2021): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam algoritma amplifikasi dan echo chamber, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. NIST (2024) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada algoritma amplifikasi dan echo chamber, risiko serupa dapat berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan algoritma amplifikasi dan echo chamber hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa

menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

13.4 Moderasi konten yang proporsional

Moderasi konten yang proporsional perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, bias, fairness, pluralitas tradisi keislaman, moderasi konten, polarisasi, dan representasi kelompok saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada perbedaan mazhab, isu gender, kelompok minoritas, pilihan bahasa, representasi wilayah, dan konflik sosial. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. Elmahjub (2023) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan Marwantika & Dauda (2025) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti moderasi konten yang proporsional tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap moderasi konten yang proporsional, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko UNESCO (2021): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan

konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam moderasi konten yang proporsional, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. NIST (2024) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada moderasi konten yang proporsional, risiko serupa dapat berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan moderasi konten yang proporsional hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

Prinsip kerja: gunakan AI untuk memperluas kapasitas manusia dalam moderasi konten yang proporsional, tetapi jangan mengalihkan tanggung jawab verifikasi, penilaian etis, dan keputusan akhir kepada model.

Prinsip operasional buku

13.5 Mengukur fairness dan keberagaman sumber

Mengukur fairness dan keberagaman sumber perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, bias, fairness, pluralitas tradisi keislaman, moderasi konten, polarisasi, dan representasi kelompok saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima.

Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada perbedaan mazhab, isu gender, kelompok minoritas, pilihan bahasa, representasi wilayah, dan konflik sosial. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. Elmahjub (2023) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan Marwantika & Dauda (2025) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti mengukur fairness dan keberagaman sumber tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap mengukur fairness dan keberagaman sumber, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko UNESCO (2021): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam mengukur fairness dan keberagaman sumber, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. NIST (2024) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah

nuansa bahasa. Pada mengukur fairness dan keberagaman sumber, risiko serupa dapat berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan mengukur fairness dan keberagaman sumber hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

Tabel 13.1. Ringkasan kontrol implementasi Bab 13

Tingkat	Contoh penggunaan	Kontrol minimum
Rendah	ide judul, format, ringkasan non-sensitif	review editor
Sedang	draft artikel, terjemahan, materi kelas	cek sumber + review ahli
Tinggi	fatwa, konsultasi personal, isu konflik	ulama/ahli wajib, dokumentasi, eskalasi

13.6 Sintesis Bab

Inti Bab 13 adalah bahwa bias, fairness, pluralitas tradisi keislaman, moderasi konten, polarisasi, dan representasi kelompok harus dikelola sebagai satu sistem. Keberhasilan tidak lahir dari penggunaan AI sebanyak-banyaknya, tetapi dari kecocokan antara tujuan, sumber, kompetensi manusia, mekanisme review, dan evaluasi dampak. Organisasi yang memiliki disiplin dokumentasi akan lebih mudah memanfaatkan model baru tanpa mengulang kesalahan dasar. Sebaliknya, organisasi yang hanya mengejar kecepatan berisiko memproduksi lebih banyak konten tetapi sekaligus memperbesar kesalahan, kebingungan, dan beban koreksi.

Bagi mahasiswa dan dosen, pesan utama bab ini adalah menjaga proses berpikir dan keterlacakan sumber. Bagi mubaligh dan ustadz, pesan utamanya adalah menjaga amanah isi dan konteks. Bagi pengelola organisasi, pesan utamanya adalah membangun SOP, peran, dan mekanisme audit. Ketiga kelompok tersebut bertemu pada satu prinsip: AI memberi manfaat ketika diletakkan di bawah kendali tujuan manusia yang jelas, sumber yang dapat diperiksa, dan etika yang konsisten.

BAB 14 ETIKA ISLAM, MAQASID AL-SHARIAH, DAN GOVERNANCE AI

Bab ini membahas etika Islam, maqasid al-shariah, amanah, akuntabilitas, keadilan, transparansi, kemaslahatan, dan pengawasan manusia. Fokus utamanya adalah membangun kemampuan mengambil keputusan, bukan hanya mengenalkan perangkat. Dalam konteks 2026, perubahan teknologi perlu dibaca bersama perubahan sosial, kebijakan, dan ekspektasi publik. Rujukan kunci yang menopang pembahasan antara lain Elmahjub (2023), Rahman dkk. (2026), UNESCO (2021), OECD (2024).

14.1 Maqasid sebagai lensa evaluasi teknologi

Maqasid sebagai lensa evaluasi teknologi perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, etika Islam, maqasid al-shariah, amanah, akuntabilitas, keadilan, transparansi, kemaslahatan, dan pengawasan manusia saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, harta, martabat, privasi, dan kemaslahatan umum. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. Elmahjub (2023) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan Rahman dkk. (2026) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti maqasid sebagai lensa evaluasi teknologi tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap maqasid sebagai lensa evaluasi teknologi, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko UNESCO (2021): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu

dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam maqasid sebagai lensa evaluasi teknologi, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. OECD (2024) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada maqasid sebagai lensa evaluasi teknologi, risiko serupa dapat berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan maqasid sebagai lensa evaluasi teknologi hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

14.2 Masalah, mafsadah, dan kehati-hatian

Masalah, mafsadah, dan kehati-hatian perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, etika Islam, maqasid al-shariah, amanah, akuntabilitas, keadilan, transparansi, kemaslahatan, dan pengawasan manusia saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang

jasas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, harta, martabat, privasi, dan kemaslahatan umum. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. Elmahjub (2023) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan Rahman dkk. (2026) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti masalah, mafsadah, dan kehati-hatian tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap masalah, mafsadah, dan kehati-hatian, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko UNESCO (2021): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam masalah, mafsadah, dan kehati-hatian, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. OECD (2024) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada masalah, mafsadah, dan kehati-hatian, risiko serupa dapat

berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan masalah, mafsadah, dan kehati-hatian hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

Prinsip kerja: gunakan AI untuk memperluas kapasitas manusia dalam masalah, mafsadah, dan kehati-hatian, tetapi jangan mengalihkan tanggung jawab verifikasi, penilaian etis, dan keputusan akhir kepada model.

Prinsip operasional buku

14.3 Akuntabilitas manusia dan amanah

Akuntabilitas manusia dan amanah perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, etika Islam, maqasid al-shariah, amanah, akuntabilitas, keadilan, transparansi, kemaslahatan, dan pengawasan manusia saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, harta, martabat, privasi, dan kemaslahatan umum. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. Elmahjub (2023) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan Rahman dkk. (2026) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti akuntabilitas manusia dan amanah tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan

dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap akuntabilitas manusia dan amanah, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko UNESCO (2021): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam akuntabilitas manusia dan amanah, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. OECD (2024) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada akuntabilitas manusia dan amanah, risiko serupa dapat berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan akuntabilitas manusia dan amanah hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau

pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

14.4 Transparansi, keadilan, dan pengawasan manusia

Transparansi, keadilan, dan pengawasan manusia perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, etika Islam, maqasid al-shariah, amanah, akuntabilitas, keadilan, transparansi, kemaslahatan, dan pengawasan manusia saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, harta, martabat, privasi, dan kemaslahatan umum. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. Elmahjub (2023) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan Rahman dkk. (2026) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti transparansi, keadilan, dan pengawasan manusia tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap transparansi, keadilan, dan pengawasan manusia, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko UNESCO (2021): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum

memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam transparansi, keadilan, dan pengawasan manusia, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. OECD (2024) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada transparansi, keadilan, dan pengawasan manusia, risiko serupa dapat berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan transparansi, keadilan, dan pengawasan manusia hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

Prinsip kerja: gunakan AI untuk memperluas kapasitas manusia dalam transparansi, keadilan, dan pengawasan manusia, tetapi jangan mengalihkan tanggung jawab verifikasi, penilaian etis, dan keputusan akhir kepada model.

Prinsip operasional buku

14.5 Kerangka TAJDID-AI untuk organisasi dakwah

Kerangka TAJDID-AI untuk organisasi dakwah perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, etika Islam, maqasid al-shariah, amanah, akuntabilitas, keadilan, transparansi, kemaslahatan,

dan pengawasan manusia saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, harta, martabat, privasi, dan kemaslahatan umum. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. Elmahjub (2023) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan Rahman dkk. (2026) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti kerangka tajdid-ai untuk organisasi dakwah tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap kerangka tajdid-ai untuk organisasi dakwah, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko UNESCO (2021): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam kerangka tajdid-ai untuk organisasi dakwah, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. OECD (2024) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan

syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada kerangka tajdid-ai untuk organisasi dakwah, risiko serupa dapat berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan kerangka tajdid-ai untuk organisasi dakwah hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

Tabel 14.1. Ringkasan kontrol implementasi Bab 14

Tingkat	Contoh penggunaan	Kontrol minimum
Rendah	ide judul, format, ringkasan non-sensitif	review editor
Sedang	draft artikel, terjemahan, materi kelas	cek sumber + review ahli
Tinggi	fatwa, konsultasi personal, isu konflik	ulama/ahli wajib, dokumentasi, eskalasi

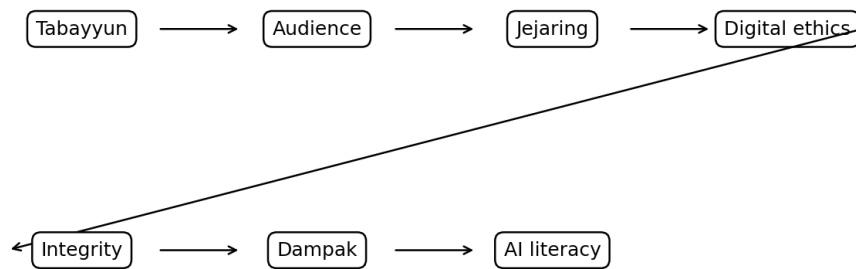
14.6 Sintesis Bab

Inti Bab 14 adalah bahwa etika Islam, maqasid al-shariah, amanah, akuntabilitas, keadilan, transparansi, kemaslahatan, dan pengawasan manusia harus dikelola sebagai satu sistem. Keberhasilan tidak lahir dari penggunaan AI sebanyak-banyaknya, tetapi dari kecocokan antara tujuan, sumber, kompetensi manusia, mekanisme review, dan evaluasi dampak. Organisasi yang memiliki disiplin dokumentasi akan lebih mudah memanfaatkan model baru tanpa mengulang kesalahan dasar. Sebaliknya, organisasi yang hanya mengejar kecepatan berisiko memproduksi lebih banyak konten tetapi sekaligus memperbesar kesalahan, kebingungan, dan beban koreksi.

Bagi mahasiswa dan dosen, pesan utama bab ini adalah menjaga proses berpikir dan keterlacakan sumber. Bagi mubaligh dan ustadz, pesan utamanya adalah menjaga amanah isi dan konteks. Bagi pengelola organisasi, pesan utamanya adalah

membangun SOP, peran, dan mekanisme audit. Ketiga kelompok tersebut bertemu pada satu prinsip: AI memberi manfaat ketika diletakkan di bawah kendali tujuan manusia yang jelas, sumber yang dapat diperiksa, dan etika yang konsisten.

Kerangka TAJDID-AI untuk Dakwah Inovatif



Gambar 6. Kerangka TAJDID-AI.

BAGIAN IV - LITERASI, ORGANISASI, DAMPAK, DAN MASA DEPAN

Bagian ini mengembangkan kerangka analitis dan praktis yang saling berhubungan. Pembaca dapat menggunakan tabel, diagram, dan checklist sebagai alat kerja untuk menyesuaikan prinsip buku dengan konteks lembaganya.

BAB 15 LITERASI AI UNTUK MAHASISWA, DOSEN, MUBALIGH, DAN USTADZ

Bab ini membahas literasi AI, pendidikan tinggi, pendidikan mubaligh, kemampuan kritis, integritas akademik, dan pembelajaran sepanjang hayat. Fokus utamanya adalah membangun kemampuan mengambil keputusan, bukan hanya mengenalkan perangkat. Dalam konteks 2026, perubahan teknologi perlu dibaca bersama perubahan sosial, kebijakan, dan ekspektasi publik. Rujukan kunci yang menopang pembahasan antara lain UNESCO (2023), Stanford HAI (2026), EU AI Act (2024/2026), Komdigi (2026).

15.1 Kompetensi dasar yang wajib dimiliki

Kompetensi dasar yang wajib dimiliki perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, literasi AI, pendidikan tinggi, pendidikan mubaligh, kemampuan kritis, integritas akademik, dan pembelajaran sepanjang hayat saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada kelas universitas, pelatihan mubaligh, madrasah, komunitas masjid, pusat studi, dan program pengembangan dosen. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. UNESCO (2023) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan Stanford HAI (2026) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti kompetensi dasar yang wajib dimiliki tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap kompetensi dasar yang wajib dimiliki, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko EU AI Act

(2024/2026): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam kompetensi dasar yang wajib dimiliki, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. Komdigi (2026) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada kompetensi dasar yang wajib dimiliki, risiko serupa dapat berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan kompetensi dasar yang wajib dimiliki hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

15.2 Kurikulum literasi AI bertingkat

Kurikulum literasi AI bertingkat perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, literasi AI, pendidikan tinggi, pendidikan mubaligh, kemampuan kritis, integritas akademik, dan pembelajaran sepanjang hayat saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara

pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada kelas universitas, pelatihan mubaligh, madrasah, komunitas masjid, pusat studi, dan program pengembangan dosen. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. UNESCO (2023) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan Stanford HAI (2026) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti kurikulum literasi ai bertingkat tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap kurikulum literasi ai bertingkat, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko EU AI Act (2024/2026): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam kurikulum literasi ai bertingkat, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. Komdigi (2026) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan

syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada kurikulum literasi ai bertingkat, risiko serupa dapat berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan kurikulum literasi ai bertingkat hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

Prinsip kerja: gunakan AI untuk memperluas kapasitas manusia dalam kurikulum literasi ai bertingkat, tetapi jangan mengalihkan tanggung jawab verifikasi, penilaian etis, dan keputusan akhir kepada model.

Prinsip operasional buku

15.3 Belajar dengan AI tanpa kehilangan daya pikir

Belajar dengan AI tanpa kehilangan daya pikir perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, literasi AI, pendidikan tinggi, pendidikan mubaligh, kemampuan kritis, integritas akademik, dan pembelajaran sepanjang hayat saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada kelas universitas, pelatihan mubaligh, madrasah, komunitas masjid, pusat studi, dan program pengembangan dosen. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. UNESCO (2023) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan Stanford HAI (2026) menempatkan literasi,

keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti belajar dengan ai tanpa kehilangan daya pikir tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap belajar dengan ai tanpa kehilangan daya pikir, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko EU AI Act (2024/2026): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam belajar dengan ai tanpa kehilangan daya pikir, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. Komdigi (2026) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada belajar dengan ai tanpa kehilangan daya pikir, risiko serupa dapat berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan belajar dengan ai tanpa kehilangan daya pikir hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup

ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

15.4 Praktik akademik dan sitasi yang bertanggung jawab

Praktik akademik dan sitasi yang bertanggung jawab perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, literasi AI, pendidikan tinggi, pendidikan mubaligh, kemampuan kritis, integritas akademik, dan pembelajaran sepanjang hayat saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada kelas universitas, pelatihan mubaligh, madrasah, komunitas masjid, pusat studi, dan program pengembangan dosen. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. UNESCO (2023) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan Stanford HAI (2026) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti praktik akademik dan sitasi yang bertanggung jawab tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap praktik akademik dan sitasi yang bertanggung jawab, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko EU AI Act (2024/2026): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam praktik akademik dan sitasi yang bertanggung jawab, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. Komdigi (2026) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada praktik akademik dan sitasi yang bertanggung jawab, risiko serupa dapat berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan praktik akademik dan sitasi yang bertanggung jawab hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

Prinsip kerja: gunakan AI untuk memperluas kapasitas manusia dalam praktik akademik dan sitasi yang bertanggung jawab, tetapi jangan mengalihkan tanggung jawab verifikasi, penilaian etis, dan keputusan akhir kepada model.

Prinsip operasional buku

15.5 Membangun budaya belajar sepanjang hayat

Membangun budaya belajar sepanjang hayat perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan

sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, literasi AI, pendidikan tinggi, pendidikan mubaligh, kemampuan kritis, integritas akademik, dan pembelajaran sepanjang hayat saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada kelas universitas, pelatihan mubaligh, madrasah, komunitas masjid, pusat studi, dan program pengembangan dosen. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. UNESCO (2023) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan Stanford HAI (2026) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti membangun budaya belajar sepanjang hayat tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap membangun budaya belajar sepanjang hayat, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko EU AI Act (2024/2026): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam membangun budaya belajar sepanjang hayat, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. Komdigi (2026) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada membangun budaya belajar sepanjang hayat, risiko serupa dapat berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan membangun budaya belajar sepanjang hayat hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

Tabel 15.1. Ringkasan kontrol implementasi Bab 15

Tahap	Pertanyaan kendali	Bukti yang disimpan
Tujuan	Apa manfaat yang ingin dicapai?	brief kegiatan
Sumber	Apakah sumber dapat dilacak?	daftar referensi/URL
AI	Apa batas instruksi dan data?	prompt/log
Review	Siapa yang memeriksa?	catatan revisi
Publikasi	Apakah ada disclosure bila perlu?	versi final
Evaluasi	Apa dampak dan koreksi?	metrik + log insiden

15.6 Sintesis Bab

Inti Bab 15 adalah bahwa literasi AI, pendidikan tinggi, pendidikan mubaligh, kemampuan kritis, integritas akademik, dan pembelajaran sepanjang hayat harus dikelola sebagai satu sistem. Keberhasilan tidak lahir dari penggunaan AI sebanyak-banyaknya, tetapi dari kecocokan antara tujuan, sumber, kompetensi manusia, mekanisme review, dan evaluasi dampak. Organisasi yang memiliki disiplin dokumentasi akan lebih mudah memanfaatkan model baru tanpa mengulang kesalahan dasar. Sebaliknya, organisasi yang hanya mengejar kecepatan berisiko memproduksi lebih banyak konten tetapi sekaligus memperbesar kesalahan, kebingungan, dan beban koreksi.

Bagi mahasiswa dan dosen, pesan utama bab ini adalah menjaga proses berpikir dan keterlacakan sumber. Bagi mubaligh dan ustadz, pesan utamanya adalah menjaga amanah isi dan konteks. Bagi pengelola organisasi, pesan utamanya adalah membangun SOP, peran, dan mekanisme audit. Ketiga kelompok tersebut bertemu pada satu prinsip: AI memberi manfaat ketika diletakkan di bawah kendali tujuan manusia yang jelas, sumber yang dapat diperiksa, dan etika yang konsisten.

BAB 16 MANAJEMEN ORGANISASI DAKWAH BERBASIS AI

Bab ini membahas manajemen perubahan, SOP, pembagian peran, pengadaan teknologi, audit, kontrol risiko, dan tata kelola organisasi. Fokus utamanya adalah membangun kemampuan mengambil keputusan, bukan hanya mengenalkan perangkat. Dalam konteks 2026, perubahan teknologi perlu dibaca bersama perubahan sosial, kebijakan, dan ekspektasi publik. Rujukan kunci yang menopang pembahasan antara lain NIST (2024), OECD (2024), UNESCO (2021), Komdigi (2026).

16.1 Peta proses dan prioritas otomasi

Peta proses dan prioritas otomasi perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, manajemen perubahan, SOP, pembagian peran, pengadaan teknologi, audit, kontrol risiko, dan tata kelola organisasi saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada perencanaan program, administrasi, kurasi materi, publikasi, analitik, layanan jamaah, dan dokumentasi pengetahuan. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. NIST (2024) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan OECD (2024) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti peta proses dan prioritas otomasi tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap peta proses dan prioritas otomasi, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko UNESCO (2021): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu

dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam peta proses dan prioritas otomasi, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. Komdigi (2026) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada peta proses dan prioritas otomasi, risiko serupa dapat berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan peta proses dan prioritas otomasi hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

16.2 Tim lintas disiplin dan pembagian peran

Tim lintas disiplin dan pembagian peran perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, manajemen perubahan, SOP, pembagian peran, pengadaan teknologi, audit, kontrol risiko, dan tata kelola organisasi saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah

yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada perencanaan program, administrasi, kurasi materi, publikasi, analitik, layanan jamaah, dan dokumentasi pengetahuan. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. NIST (2024) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan OECD (2024) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti tim lintas disiplin dan pembagian peran tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap tim lintas disiplin dan pembagian peran, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko UNESCO (2021): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam tim lintas disiplin dan pembagian peran, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. Komdigi (2026) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah

nuansa bahasa. Pada tim lintas disiplin dan pembagian peran, risiko serupa dapat berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan tim lintas disiplin dan pembagian peran hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

Prinsip kerja: gunakan AI untuk memperluas kapasitas manusia dalam tim lintas disiplin dan pembagian peran, tetapi jangan mengalihkan tanggung jawab verifikasi, penilaian etis, dan keputusan akhir kepada model.

Prinsip operasional buku

16.3 SOP penggunaan AI dan tingkat risiko

SOP penggunaan AI dan tingkat risiko perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, manajemen perubahan, SOP, pembagian peran, pengadaan teknologi, audit, kontrol risiko, dan tata kelola organisasi saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada perencanaan program, administrasi, kurasi materi, publikasi, analitik, layanan jamaah, dan dokumentasi pengetahuan. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. NIST (2024) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan OECD (2024) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan

yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti sop penggunaan ai dan tingkat risiko tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap sop penggunaan ai dan tingkat risiko, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko UNESCO (2021): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam sop penggunaan ai dan tingkat risiko, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. Komdigi (2026) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada sop penggunaan ai dan tingkat risiko, risiko serupa dapat berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan sop penggunaan ai dan tingkat risiko hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog,

kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

16.4 Manajemen vendor dan layanan cloud

Manajemen vendor dan layanan cloud perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, manajemen perubahan, SOP, pembagian peran, pengadaan teknologi, audit, kontrol risiko, dan tata kelola organisasi saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada perencanaan program, administrasi, kurasi materi, publikasi, analitik, layanan jamaah, dan dokumentasi pengetahuan. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. NIST (2024) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan OECD (2024) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti manajemen vendor dan layanan cloud tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap manajemen vendor dan layanan cloud, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko UNESCO (2021): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam manajemen vendor dan layanan cloud, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. Komdigi (2026) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada manajemen vendor dan layanan cloud, risiko serupa dapat berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan manajemen vendor dan layanan cloud hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

Prinsip kerja: gunakan AI untuk memperluas kapasitas manusia dalam manajemen vendor dan layanan cloud, tetapi jangan mengalihkan tanggung jawab verifikasi, penilaian etis, dan keputusan akhir kepada model.

Prinsip operasional buku

16.5 Audit, dokumentasi, dan perbaikan berkelanjutan

Audit, dokumentasi, dan perbaikan berkelanjutan perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan

perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, manajemen perubahan, SOP, pembagian peran, pengadaan teknologi, audit, kontrol risiko, dan tata kelola organisasi saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada perencanaan program, administrasi, kurasi materi, publikasi, analitik, layanan jamaah, dan dokumentasi pengetahuan. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. NIST (2024) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan OECD (2024) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti audit, dokumentasi, dan perbaikan berkelanjutan tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap audit, dokumentasi, dan perbaikan berkelanjutan, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko UNESCO (2021): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam audit, dokumentasi, dan perbaikan berkelanjutan, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. Komdigi (2026) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada audit, dokumentasi, dan perbaikan berkelanjutan, risiko serupa dapat berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan audit, dokumentasi, dan perbaikan berkelanjutan hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

Tabel 16.1. Ringkasan kontrol implementasi Bab 16

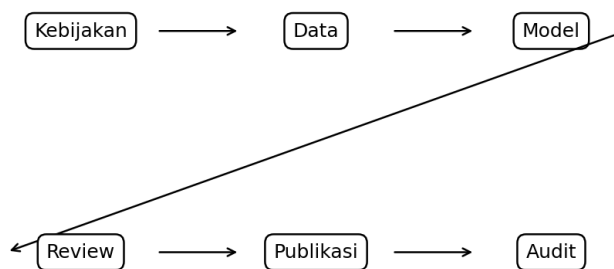
Tahap	Pertanyaan kendali	Bukti yang disimpan
Tujuan	Apa manfaat yang ingin dicapai?	brief kegiatan
Sumber	Apakah sumber dapat dilacak?	daftar referensi/URL
AI	Apa batas instruksi dan data?	prompt/log
Review	Siapa yang memeriksa?	catatan revisi
Publikasi	Apakah ada disclosure bila perlu?	versi final
Evaluasi	Apa dampak dan koreksi?	metrik + log insiden

16.6 Sintesis Bab

Inti Bab 16 adalah bahwa manajemen perubahan, SOP, pembagian peran, pengadaan teknologi, audit, kontrol risiko, dan tata kelola organisasi harus dikelola sebagai satu sistem. Keberhasilan tidak lahir dari penggunaan AI sebanyak-banyaknya, tetapi dari kecocokan antara tujuan, sumber, kompetensi manusia, mekanisme review, dan evaluasi dampak. Organisasi yang memiliki disiplin dokumentasi akan lebih mudah memanfaatkan model baru tanpa mengulang kesalahan dasar. Sebaliknya, organisasi yang hanya mengejar kecepatan berisiko memproduksi lebih banyak konten tetapi sekaligus memperbesar kesalahan, kebingungan, dan beban koreksi.

Bagi mahasiswa dan dosen, pesan utama bab ini adalah menjaga proses berpikir dan keterlacakan sumber. Bagi mubaligh dan ustadz, pesan utamanya adalah menjaga amanah isi dan konteks. Bagi pengelola organisasi, pesan utamanya adalah membangun SOP, peran, dan mekanisme audit. Ketiga kelompok tersebut bertemu pada satu prinsip: AI memberi manfaat ketika diletakkan di bawah kendali tujuan manusia yang jelas, sumber yang dapat diperiksa, dan etika yang konsisten.

Siklus Tata Kelola AI Organisasi Dakwah



Gambar 7. Siklus tata kelola AI organisasi dakwah.

BAB 17 MENGUKUR DAMPAK DAKWAH: DARI METRIK PLATFORM KE PERUBAHAN SOSIAL

Bab ini membahas evaluasi dampak, indikator proses dan outcome, metode campuran, eksperimen etis, retensi, kepercayaan, dan pembelajaran organisasi. Fokus utamanya adalah membangun kemampuan mengambil keputusan, bukan hanya mengenalkan perangkat. Dalam konteks 2026, perubahan teknologi perlu dibaca bersama perubahan sosial, kebijakan, dan ekspektasi publik. Rujukan kunci yang menopang pembahasan antara lain UNESCO (2023), NIST (2024), OECD (2024), Stanford HAI (2026).

17.1 Membedakan vanity metrics dan outcome

Membedakan vanity metrics dan outcome perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, evaluasi dampak, indikator proses dan outcome, metode campuran, eksperimen etis, retensi, kepercayaan, dan pembelajaran organisasi saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada jangkauan, retensi, pemahaman, perubahan sikap, kualitas dialog, kepercayaan, partisipasi, dan aksi sosial. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. UNESCO (2023) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan NIST (2024) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti membedakan vanity metrics dan outcome tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap membedakan vanity metrics dan outcome, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko

OECD (2024): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam membedakan vanity metrics dan outcome, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. Stanford HAI (2026) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada membedakan vanity metrics dan outcome, risiko serupa dapat berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan membedakan vanity metrics dan outcome hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

17.2 Indikator pemahaman dan kepercayaan

Indikator pemahaman dan kepercayaan perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, evaluasi dampak, indikator proses dan outcome, metode campuran, eksperimen etis, retensi, kepercayaan, dan pembelajaran organisasi saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat

mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada jangkauan, retensi, pemahaman, perubahan sikap, kualitas dialog, kepercayaan, partisipasi, dan aksi sosial. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. UNESCO (2023) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan NIST (2024) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti indikator pemahaman dan kepercayaan tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap indikator pemahaman dan kepercayaan, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko OECD (2024): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam indikator pemahaman dan kepercayaan, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. Stanford HAI (2026) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan

syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada indikator pemahaman dan kepercayaan, risiko serupa dapat berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan indikator pemahaman dan kepercayaan hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

Prinsip kerja: gunakan AI untuk memperluas kapasitas manusia dalam indikator pemahaman dan kepercayaan, tetapi jangan mengalihkan tanggung jawab verifikasi, penilaian etis, dan keputusan akhir kepada model.

Prinsip operasional buku

17.3 Metode survei, analitik, dan triangulasi

Metode survei, analitik, dan triangulasi perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, evaluasi dampak, indikator proses dan outcome, metode campuran, eksperimen etis, retensi, kepercayaan, dan pembelajaran organisasi saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada jangkauan, retensi, pemahaman, perubahan sikap, kualitas dialog, kepercayaan, partisipasi, dan aksi sosial. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. UNESCO (2023) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan NIST (2024) menempatkan literasi,

keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti metode survei, analitik, dan triangulasi tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap metode survei, analitik, dan triangulasi, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko OECD (2024): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam metode survei, analitik, dan triangulasi, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. Stanford HAI (2026) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada metode survei, analitik, dan triangulasi, risiko serupa dapat berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan metode survei, analitik, dan triangulasi hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan

sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

17.4 Eksperimen konten secara etis

Eksperimen konten secara etis perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, evaluasi dampak, indikator proses dan outcome, metode campuran, eksperimen etis, retensi, kepercayaan, dan pembelajaran organisasi saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada jangkauan, retensi, pemahaman, perubahan sikap, kualitas dialog, kepercayaan, partisipasi, dan aksi sosial. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. UNESCO (2023) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan NIST (2024) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti eksperimen konten secara etis tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap eksperimen konten secara etis, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko OECD (2024): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam eksperimen konten secara etis, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. Stanford HAI (2026) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada eksperimen konten secara etis, risiko serupa dapat berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan eksperimen konten secara etis hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

Prinsip kerja: gunakan AI untuk memperluas kapasitas manusia dalam eksperimen konten secara etis, tetapi jangan mengalihkan tanggung jawab verifikasi, penilaian etis, dan keputusan akhir kepada model.

Prinsip operasional buku

17.5 Pelaporan dampak dan pembelajaran organisasi

Pelaporan dampak dan pembelajaran organisasi perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, evaluasi dampak,

indikator proses dan outcome, metode campuran, eksperimen etis, retensi, kepercayaan, dan pembelajaran organisasi saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada jangkauan, retensi, pemahaman, perubahan sikap, kualitas dialog, kepercayaan, partisipasi, dan aksi sosial. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. UNESCO (2023) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan NIST (2024) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti pelaporan dampak dan pembelajaran organisasi tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap pelaporan dampak dan pembelajaran organisasi, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko OECD (2024): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam pelaporan dampak dan pembelajaran organisasi, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. Stanford HAI (2026) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada pelaporan dampak dan pembelajaran organisasi, risiko serupa dapat berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan pelaporan dampak dan pembelajaran organisasi hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

Tabel 17.1. Ringkasan kontrol implementasi Bab 17

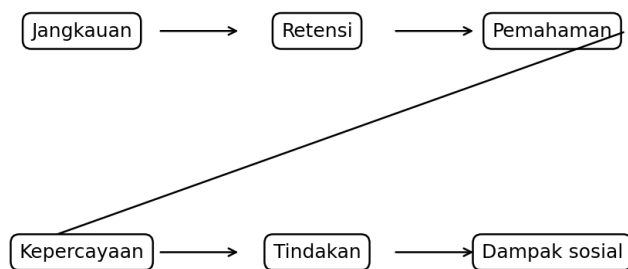
Tahap	Pertanyaan kendali	Bukti yang disimpan
Tujuan	Apa manfaat yang ingin dicapai?	brief kegiatan
Sumber	Apakah sumber dapat dilacak?	daftar referensi/URL
AI	Apa batas instruksi dan data?	prompt/log
Review	Siapa yang memeriksa?	catatan revisi
Publikasi	Apakah ada disclosure bila perlu?	versi final
Evaluasi	Apa dampak dan koreksi?	metrik + log insiden

17.6 Sintesis Bab

Inti Bab 17 adalah bahwa evaluasi dampak, indikator proses dan outcome, metode campuran, eksperimen etis, retensi, kepercayaan, dan pembelajaran organisasi harus dikelola sebagai satu sistem. Keberhasilan tidak lahir dari penggunaan AI sebanyak-banyaknya, tetapi dari kecocokan antara tujuan, sumber, kompetensi manusia, mekanisme review, dan evaluasi dampak. Organisasi yang memiliki disiplin dokumentasi akan lebih mudah memanfaatkan model baru tanpa mengulang kesalahan dasar. Sebaliknya, organisasi yang hanya mengejar kecepatan berisiko memproduksi lebih banyak konten tetapi sekaligus memperbesar kesalahan, kebingungan, dan beban koreksi.

Bagi mahasiswa dan dosen, pesan utama bab ini adalah menjaga proses berpikir dan keterlacakan sumber. Bagi mubaligh dan ustadz, pesan utamanya adalah menjaga amanah isi dan konteks. Bagi pengelola organisasi, pesan utamanya adalah membangun SOP, peran, dan mekanisme audit. Ketiga kelompok tersebut bertemu pada satu prinsip: AI memberi manfaat ketika diletakkan di bawah kendali tujuan manusia yang jelas, sumber yang dapat diperiksa, dan etika yang konsisten.

Kerangka Evaluasi Dampak Dakwah Digital



Gambar 8. Kerangka evaluasi dampak dakwah digital.

BAB 18 MASA DEPAN DAKWAH 2026-2030 DAN AGENDA STRATEGIS

Bab ini membahas masa depan AI, human-centered design, kedaulatan data dan bahasa, standar provenance, regulasi, agenda riset, dan transformasi kelembagaan. Fokus utamanya adalah membangun kemampuan mengambil keputusan, bukan hanya mengenalkan perangkat. Dalam konteks 2026, perubahan teknologi perlu dibaca bersama perubahan sosial, kebijakan, dan ekspektasi publik. Rujukan kunci yang menopang pembahasan antara lain Stanford HAI (2026), Komdigi (2026), EU AI Act (2024/2026), C2PA (2025).

18.1 Tren teknologi yang perlu dipantau

Tren teknologi yang perlu dipantau perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, masa depan AI, human-centered design, kedaulatan data dan bahasa, standar provenance, regulasi, agenda riset, dan transformasi kelembagaan saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada asisten multimodal, agen otonom terbatas, model on-device, provenance media, standar interoperabilitas, dan tata kelola adaptif. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. Stanford HAI (2026) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan Komdigi (2026) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti tren teknologi yang perlu dipantau tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap tren teknologi yang perlu dipantau, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko EU AI Act

(2024/2026): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam tren teknologi yang perlu dipantau, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. C2PA (2025) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada tren teknologi yang perlu dipantau, risiko serupa dapat berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan tren teknologi yang perlu dipantau hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

18.2 AI personal namun tetap human-centered

AI personal namun tetap human-centered perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, masa depan AI, human-centered design, kedaulatan data dan bahasa, standar provenance, regulasi, agenda riset, dan transformasi kelembagaan saling berkelindan sehingga keputusan

teknis dapat mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada asisten multimodal, agen otonom terbatas, model on-device, provenance media, standar interoperabilitas, dan tata kelola adaptif. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. Stanford HAI (2026) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan Komdigi (2026) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti ai personal namun tetap human-centered tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap ai personal namun tetap human-centered, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko EU AI Act (2024/2026): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam ai personal namun tetap human-centered, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. C2PA (2025) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan

syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada ai personal namun tetap human-centered, risiko serupa dapat berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan ai personal namun tetap human-centered hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

Prinsip kerja: gunakan AI untuk memperluas kapasitas manusia dalam ai personal namun tetap human-centered, tetapi jangan mengalihkan tanggung jawab verifikasi, penilaian etis, dan keputusan akhir kepada model.

Prinsip operasional buku

18.3 Kedaulatan bahasa dan pengetahuan Islam

Kedaulatan bahasa dan pengetahuan Islam perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, masa depan AI, human-centered design, kedaulatan data dan bahasa, standar provenance, regulasi, agenda riset, dan transformasi kelembagaan saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada asisten multimodal, agen otonom terbatas, model on-device, provenance media, standar interoperabilitas, dan tata kelola adaptif. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. Stanford HAI (2026) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan Komdigi (2026) menempatkan

literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti kedaulatan bahasa dan pengetahuan islam tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap kedaulatan bahasa dan pengetahuan islam, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko EU AI Act (2024/2026): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam kedaulatan bahasa dan pengetahuan islam, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. C2PA (2025) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada kedaulatan bahasa dan pengetahuan islam, risiko serupa dapat berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan kedaulatan bahasa dan pengetahuan islam hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan

sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

18.4 Regulasi, provenance, dan standar baru

Regulasi, provenance, dan standar baru perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, masa depan AI, human-centered design, kedaulatan data dan bahasa, standar provenance, regulasi, agenda riset, dan transformasi kelembagaan saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada asisten multimodal, agen otonom terbatas, model on-device, provenance media, standar interoperabilitas, dan tata kelola adaptif. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. Stanford HAI (2026) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan Komdigi (2026) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti regulasi, provenance, dan standar baru tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap regulasi, provenance, dan standar baru, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko EU AI Act (2024/2026): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam regulasi, provenance, dan standar baru, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. C2PA (2025) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada regulasi, provenance, dan standar baru, risiko serupa dapat berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan regulasi, provenance, dan standar baru hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

Prinsip kerja: gunakan AI untuk memperluas kapasitas manusia dalam regulasi, provenance, dan standar baru, tetapi jangan mengalihkan tanggung jawab verifikasi, penilaian etis, dan keputusan akhir kepada model.

Prinsip operasional buku

18.5 Agenda riset dan transformasi kelembagaan

Agenda riset dan transformasi kelembagaan perlu ditempatkan dalam kerangka dakwah sebagai proses membangun pemahaman, keteladanan, dan perubahan sosial, bukan sekadar produksi pesan. Dalam lingkungan digital, masa depan AI, human-centered design, kedaulatan data dan bahasa, standar provenance, regulasi, agenda riset, dan transformasi kelembagaan saling berkelindan sehingga keputusan teknis dapat mengubah cara pesan diterima. Karena itu, inovasi yang baik selalu dimulai dari tujuan dakwah yang jelas, identifikasi kebutuhan mad'u, serta batas yang tidak boleh dilanggar. Contoh penerapannya tampak pada asisten multimodal, agen otonom terbatas, model on-device, provenance media, standar interoperabilitas, dan tata kelola adaptif. Teknologi dapat mempercepat proses, tetapi kualitas tetap ditentukan oleh ketepatan sumber, kebijaksanaan komunikasi, dan tanggung jawab manusia yang menggunakannya.

Literatur mutakhir memperlihatkan bahwa perubahan teknologi AI bergerak lebih cepat daripada kebiasaan kelembagaan. Stanford HAI (2026) menekankan perubahan kapabilitas dan adopsi AI, sedangkan Komdigi (2026) menempatkan literasi, keselamatan, dan pendekatan berpusat pada manusia sebagai syarat penggunaan yang bermakna. Untuk konteks dakwah, temuan tersebut berarti agenda riset dan transformasi kelembagaan tidak cukup dibahas sebagai soal perangkat. Ia berkaitan dengan budaya organisasi, kualitas keputusan editorial, dan kemampuan membedakan keluaran mesin dari pengetahuan yang telah diverifikasi. Sikap kritis seperti ini penting terutama ketika sistem generatif dapat menghasilkan uraian yang meyakinkan meskipun sumber atau detailnya tidak tepat.

Secara praktis, proses kerja dapat dibangun melalui enam langkah: merumuskan tujuan, menyiapkan sumber, memberi instruksi yang terukur, menilai keluaran, memverifikasi fakta, dan mendokumentasikan revisi. Pada tahap agenda riset dan transformasi kelembagaan, setiap langkah sebaiknya memiliki penanggung jawab dan kriteria lolos. Model AI boleh menyusun alternatif, meringkas, menerjemahkan, mengelompokkan, atau mengusulkan format, tetapi keputusan final berada pada manusia. Prinsip ini selaras dengan pendekatan manajemen risiko EU AI Act (2024/2026): risiko harus dikenali sesuai konteks, diukur berdasarkan dampak, lalu dikendalikan dengan mekanisme yang dapat diaudit. Dengan demikian efisiensi tidak dibayar dengan hilangnya akuntabilitas.

Aspek audiens juga menentukan mutu implementasi. Materi untuk mahasiswa memerlukan argumen, referensi, dan ruang analitis; materi untuk jamaah umum memerlukan bahasa yang ringkas dan contoh yang dekat; sedangkan layanan konsultasi memerlukan kehati-hatian karena menyentuh kondisi personal. Dalam agenda riset dan transformasi kelembagaan, personalisasi seharusnya berarti menyesuaikan tingkat bahasa, format, dan aksesibilitas, bukan mengeksploitasi kerentanan psikologis atau mengumpulkan data berlebihan. C2PA (2025) memberi dasar penting mengenai perlindungan manusia, transparansi, atau integritas informasi. Bagi lembaga dakwah, prinsip ini dapat diterjemahkan menjadi kebijakan sederhana: jelaskan kapan AI digunakan, batasi data yang dimasukkan, dan sediakan jalur koreksi manusia.

Risiko yang paling sering muncul bukan hanya kesalahan faktual, tetapi juga kehilangan konteks. AI dapat mencampur pendapat lintas mazhab, menghilangkan syarat suatu hukum, menyederhanakan perdebatan akademik, atau mengubah nuansa bahasa. Pada agenda riset dan transformasi kelembagaan, risiko serupa dapat berkembang menjadi misinformasi, bias, pelanggaran privasi, atau kerusakan reputasi jika konten langsung dipublikasikan. Karena itu, lembaga perlu membedakan konten berisiko rendah - misalnya ide judul - dari konten berisiko tinggi seperti fatwa, nasihat kesehatan, isu konflik, atau materi yang menyebut individu. Semakin tinggi risikonya, semakin kuat tuntutan verifikasi dan persetujuan manusia.

Indikator keberhasilan agenda riset dan transformasi kelembagaan hendaknya tidak berhenti pada jumlah tayangan. Ukuran yang lebih bermakna mencakup ketepatan sumber, keterbacaan, pemahaman audiens, jumlah koreksi, kualitas dialog, kepatuhan pada kebijakan privasi, dan dampak terhadap tindakan positif. Dokumentasi metrik ini membuat organisasi dapat belajar dari kesalahan tanpa menyalahkan teknologi atau pengguna secara simplistik. Pada akhirnya, AI memberi nilai ketika ia memperkuat proses dakwah yang sudah berorientasi pada hikmah, tabayyun, amanah, dan kemaslahatan. Dengan cara itu, inovasi menjadi disiplin kelembagaan, bukan sekadar tren perangkat yang cepat berganti.

Tabel 18.1. Ringkasan kontrol implementasi Bab 18

Tahap	Pertanyaan kendali	Bukti yang disimpan
Tujuan	Apa manfaat yang ingin dicapai?	brief kegiatan
Sumber	Apakah sumber dapat dilacak?	daftar referensi/URL
AI	Apakah batas instruksi dan data?	prompt/log
Review	Siapa yang memeriksa?	catatan revisi
Publikasi	Apakah ada disclosure bila perlu?	versi final
Evaluasi	Apakah dampak dan koreksi?	metrik + log insiden

18.6 Sintesis Bab

Inti Bab 18 adalah bahwa masa depan AI, human-centered design, kedaulatan data dan bahasa, standar provenance, regulasi, agenda riset, dan transformasi kelembagaan harus dikelola sebagai satu sistem. Keberhasilan tidak lahir dari penggunaan AI sebanyak-banyaknya, tetapi dari kecocokan antara tujuan, sumber, kompetensi manusia, mekanisme review, dan evaluasi dampak. Organisasi yang memiliki disiplin dokumentasi akan lebih mudah memanfaatkan model baru tanpa mengulang kesalahan dasar. Sebaliknya, organisasi yang hanya mengejar kecepatan berisiko memproduksi lebih banyak konten tetapi sekaligus memperbesar kesalahan, kebingungan, dan beban koreksi.

Bagi mahasiswa dan dosen, pesan utama bab ini adalah menjaga proses berpikir dan keterlacakan sumber. Bagi mubaligh dan ustadz, pesan utamanya adalah menjaga amanah isi dan konteks. Bagi pengelola organisasi, pesan utamanya adalah membangun SOP, peran, dan mekanisme audit. Ketiga kelompok tersebut bertemu pada satu prinsip: AI memberi manfaat ketika diletakkan di bawah kendali tujuan manusia yang jelas, sumber yang dapat diperiksa, dan etika yang konsisten.

PENUTUP

Dakwah inovatif di era AI bukanlah proyek mengganti manusia dengan mesin. Ia adalah proyek memperkuat kapasitas manusia untuk mencari, menilai, menyusun, menerjemahkan, dan menyebarkan pengetahuan dengan lebih baik. Teknologi memberi kecepatan dan skala; tradisi ilmu memberi kedalaman; etika memberi batas; sedangkan komunitas memberi konteks. Keempatnya harus hadir bersama.

Perkembangan sampai 2026 menunjukkan bahwa AI bergerak menuju multimodalitas, penggunaan alat, agen, dan integrasi dalam layanan sehari-hari. Pada saat yang sama, tata kelola berkembang melalui pendekatan berbasis risiko, tuntutan transparansi, provenance, AI literacy, dan pengawasan manusia. Lembaga dakwah yang mempersiapkan kebijakan dari sekarang akan lebih siap menghadapi perubahan model dan regulasi berikutnya.

Prinsip paling penting tetap sederhana: sumber harus dapat dilacak, klaim harus dapat diperiksa, data pribadi harus dilindungi, konten sintetis tidak boleh menipu, dan keputusan berisiko tinggi harus berada di tangan manusia yang kompeten. Dalam bahasa etika Islam, inovasi harus ditimbang dengan amanah, keadilan, tabayyun, dan kemaslahatan.

LAMPIRAN A SOP PENGGUNAAN AI UNTUK PRODUKSI DAKWAH

Tabel A.1. SOP ringkas penggunaan AI

Tahap	Ketentuan
1. Brief	Tetapkan tujuan, audiens, kanal, tingkat risiko, dan penanggung jawab.
2. Sumber	Kumpulkan rujukan resmi dan literatur yang dapat dilacak.
3. Prompt	Nyatakan tugas, konteks, sumber yang boleh dipakai, larangan, dan format keluaran.
4. Draft	Gunakan AI untuk alternatif, bukan sebagai keputusan final.
5. Verifikasi	Periksa dalil, kutipan, angka, nama, tanggal, serta klaim sensitif.
6. Review	Minta ahli/ulama jika topik berisiko tinggi atau mengandung hukum agama.
7. Disclosure	Berikan penjelasan penggunaan AI bila relevan bagi transparansi.
8. Publikasi	Simpan versi final, sumber, dan catatan persetujuan.
9. Monitoring	Pantau koreksi, respons audiens, dan potensi penyalahgunaan.
10. Evaluasi	Dokumentasikan pelajaran untuk pembaruan SOP.

SOP harus proporsional dengan tingkat risiko. Penggunaan AI untuk ide judul tidak memerlukan kontrol yang sama dengan konsultasi agama personal. Namun semua penggunaan perlu tunduk pada larangan dasar: jangan memasukkan data rahasia tanpa izin, jangan mengarang sumber, jangan menerbitkan keluaran yang belum diperiksa, dan jangan membuat representasi palsu seolah-olah berasal dari tokoh tertentu.

Organisasi dapat menambahkan kolom nomor versi, nama reviewer, tanggal persetujuan, serta klasifikasi data. Dokumen ini sebaiknya menjadi bagian dari sistem manajemen pengetahuan agar koreksi dan insiden tidak hilang ketika anggota tim berganti.

LAMPIRAN B CHECKLIST EDITORIAL DAN TABAYYUN DIGITAL

Tabel B.1. Checklist editorial

Area	Pertanyaan verifikasi
Sumber	Apakah ayat, hadis, fatwa, data, dan kutipan dapat dilacak?
Konteks	Apakah syarat, batas, dan perbedaan pendapat dijelaskan?
Akurasi	Apakah nama, angka, tanggal, dan istilah telah dicek silang?
Privasi	Apakah data pribadi diminimalkan dan memiliki dasar penggunaan?
Hak cipta	Apakah materi memiliki izin/lisensi yang sesuai?
AI	Apakah ada bagian yang dibuat atau diubah oleh AI dan perlu disclosure?
Bias	Apakah sumber terlalu sempit atau hanya mewakili satu sudut pandang?
Keamanan	Apakah file, akun, dan akses dikelola secara aman?
Risiko	Apakah materi sensitif membutuhkan reviewer tambahan?
Koreksi	Apakah tersedia mekanisme koreksi setelah publikasi?

LAMPIRAN C CONTOH KEBIJAKAN DISCLOSURE PENGUNAAN AI

Contoh 1 - Bantuan terbatas: 'AI digunakan untuk membantu penyusunan outline dan penyuntingan bahasa. Seluruh sumber, argumen, dan naskah akhir diperiksa oleh editor manusia.'

Contoh 2 - Konten visual: 'Ilustrasi pada materi ini dibuat dengan bantuan AI generatif dan telah ditinjau oleh tim editorial. Ilustrasi bukan dokumentasi peristiwa nyata.'

Contoh 3 - Chatbot: 'Asisten ini menyediakan informasi umum berbasis basis pengetahuan yang dikurasi. Jawaban bukan fatwa dan dapat mengandung kekeliruan. Pertanyaan sensitif akan diarahkan kepada pengelola atau ahli.'

Disclosure tidak harus panjang, tetapi harus menjawab hal yang relevan bagi kepercayaan publik: bagian apa yang dibantu AI, siapa yang bertanggung jawab atas versi final, dan batas apa yang perlu dipahami pengguna.

LAMPIRAN D TEMPLATE PROMPT PROFESIONAL UNTUK DAKWAH

Tabel D.1. Template prompt yang dapat diadaptasi

Kegunaan	Template
Riset sumber	Tugas: susun peta sumber tentang [topik]. Gunakan hanya sumber yang saya berikan. Pisahkan fakta, interpretasi, dan bagian yang belum terverifikasi. Untuk setiap klaim, tampilkan sumber dan bagian pendukung. Jangan membuat kutipan atau referensi baru.
Draft artikel	Tulis draft artikel untuk audiens [profil]. Tujuan: [tujuan]. Struktur: [struktur]. Gunakan daftar sumber berikut. Tandai setiap klaim yang memerlukan verifikasi. Hindari bahasa menghakimi dan jangan menyatakan fatwa.
Ringkasan khutbah	Ringkas naskah berikut menjadi outline khutbah 15 menit. Pertahankan dalil persis seperti sumber. Jangan menambahkan hadis atau ayat. Sertakan pesan utama, transisi, dan penutup yang tidak berlebihan.
FAQ chatbot	Berdasarkan basis pengetahuan berikut, buat jawaban singkat. Jika informasi tidak tersedia, katakan tidak tahu dan arahkan pengguna ke petugas. Jangan menebak. Untuk pertanyaan hukum agama personal, eskalasikan kepada ustadz.
Audit konten	Periksa naskah berikut untuk: klaim tanpa sumber, angka/tanggal, potensi bias, privasi, hak cipta, bahasa manipulatif, dan bagian yang mungkin disalahpahami. Jangan mengubah naskah; buat daftar temuan dan saran.

Prompt yang baik tidak menjamin kebenaran. Ia hanya membuat instruksi lebih jelas dan proses lebih dapat diaudit. Kualitas tetap bergantung pada basis pengetahuan, validasi, dan kompetensi reviewer.

GLOSARIUM

A - Agentic AI: Sistem AI yang dapat merencanakan langkah, memakai alat, dan menjalankan rangkaian tugas dengan tingkat otonomi tertentu.

B - Bias: Pola ketidakadilan atau penyimpangan sistematis pada data, model, atau keputusan.

C - Content Credentials: Informasi provenance yang dapat diverifikasi untuk menjelaskan asal dan riwayat perubahan media digital.

D - Deepfake: Media sintetis yang meniru identitas atau peristiwa secara meyakinkan dan dapat menyesatkan.

E - Embedding: Representasi numerik makna teks atau data untuk pencarian semantik dan pengelompokan.

F - Foundation Model: Model skala besar yang dapat diadaptasi untuk banyak tugas.

G - Generative AI: AI yang menghasilkan konten baru seperti teks, gambar, audio, video, atau kode.

H - Hallucination: Keluaran AI yang terdengar meyakinkan tetapi tidak didukung fakta atau sumber yang benar.

I - Inference: Proses penggunaan model terlatih untuk menghasilkan prediksi atau keluaran.

J - Jejak Audit: Rekaman keputusan, prompt, sumber, revisi, dan persetujuan yang memungkinkan proses ditelusuri.

K - Knowledge Base: Kumpulan sumber yang dikurasi untuk mendukung pencarian atau jawaban sistem.

L - Large Language Model: Model bahasa skala besar yang mempelajari pola dari korpus luas untuk memproses dan menghasilkan bahasa.

M - Multimodal AI: AI yang dapat memproses atau menghasilkan lebih dari satu jenis data, misalnya teks, gambar, audio, dan video.

N - NLP: Natural Language Processing; bidang AI untuk pemrosesan bahasa manusia.

O - Oversight Manusia: Pengawasan manusia terhadap penggunaan, keputusan, dan dampak sistem AI.

P - Prompt: Instruksi atau konteks yang diberikan kepada model untuk mengarahkan keluaran.

Q - Quality Assurance: Proses pemeriksaan sistematis untuk memastikan kualitas, akurasi, keamanan, dan konsistensi.

R - RAG: Retrieval-Augmented Generation; metode menggabungkan pencarian sumber dengan generasi jawaban.

S - Synthetic Media: Media yang dibuat atau dimodifikasi secara substansial oleh sistem komputasi atau AI.

T - Tabayyun Digital: Praktik verifikasi informasi digital sebelum dipercaya atau disebarkan.

U - User Consent: Persetujuan pengguna terhadap pemrosesan data atau penggunaan tertentu yang relevan.

V - Vector Database: Basis data yang dioptimalkan untuk menyimpan embedding dan melakukan pencarian kemiripan.

W - Watermark: Penanda pada konten yang dapat membantu identifikasi asal, status, atau proses pembuatan.

X - eXplainability: Kemampuan menjelaskan faktor atau alasan di balik keluaran dan perilaku sistem AI.

Y - Yield: Dalam konteks evaluasi, proporsi keluaran yang berguna atau lolos kriteria kualitas setelah proses AI.

Z - Zero-shot: Kemampuan model menangani tugas baru tanpa contoh khusus dalam prompt atau pelatihan tambahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Autio, C., Schwartz, R., Dunietz, J., Jain, S., Stanley, M., Tabassi, E., Hall, P., & Roberts, K. (2024). Artificial Intelligence Risk Management Framework: Generative Artificial Intelligence Profile (NIST AI 600-1). National Institute of Standards and Technology. <https://doi.org/10.6028/NIST.AI.600-1>
- Belhassen, Y., Ali, A., & Hachicha, S. (2025). Algorithmic Ijtihad and the Reconfiguration of Religious Authority: Evaluating the Epistemic and Ethical Boundaries of Generative AI in Islamic Jurisprudence. *International Journal of Noesantara Islamic Studies*, 2(2). <https://doi.org/10.70177/ijonis.v2i2.3287>
- Bostrom, N. (2014). *Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies*. Oxford University Press.
- Bunt, G. R. (2003). *Islam in the Digital Age: E-Jihad, Online Fatwas and Cyber Islamic Environments*. Pluto Press.
- Bunt, G. R. (2018). *Hashtag Islam: How Cyber-Islamic Environments Are Transforming Religious Authority*. University of North Carolina Press.
- Campbell, H. A. (Ed.). (2013). *Digital Religion: Understanding Religious Practice in New Media Worlds*. Routledge.
- Chesney, R., & Citron, D. (2019). Deep Fakes: A Looming Challenge for Privacy, Democracy, and National Security. *California Law Review*, 107, 1753-1820.
- Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA). (2025). *Content Credentials: C2PA Technical Specification, Version 2.2*. <https://spec.c2pa.org/>
- Dwivedi, Y. K., et al. (2021). Artificial Intelligence (AI): Multidisciplinary Perspectives on Emerging Challenges, Opportunities, and Agenda for Research, Practice and Policy. *International Journal of Information Management*, 57, 101994. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2019.08.002>
- Elmahjub, E. (2023). Artificial Intelligence (AI) in Islamic Ethics: Towards Pluralist Ethical Benchmarking for AI. *Philosophy & Technology*, 36, 73. <https://doi.org/10.1007/s13347-023-00668-x>
- European Parliament and Council of the European Union. (2024). Regulation (EU) 2024/1689 laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act), consolidated version accessed 2026. EUR-Lex.
- European Commission. (2025). *General-purpose AI obligations under the AI Act. Shaping Europe's Digital Future*.
- European Commission. (2025). *General-Purpose AI Code of Practice. Shaping Europe's Digital Future*.
- Fatimah, N., Murjazin, & Kharis, M. A. (2026). Algorithmic Ulama: Generative AI, Religious Authority, and the Reconfiguration of Da'wah Communication Ethics in Indonesian Islam. *SUHU: Journal of Sufism and Humanities*, 2(1). <https://doi.org/10.69548/suhu.v2i1.94>

- Famuji, U., Malik, A. A., Nurhaidah, S. N., & Fahrany, S. (2026). Shifting Religious Authority in the AI Era: A Comparative Study of Gen Z Trust in AI Guidance and Traditional Ulama. *Wasilatuna: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 9(1). <https://doi.org/10.38073/wasilatuna.v9i1.3973>
- Huda, S., Azhar, M. A. Z., Huda, A. N., Putri, N. R., dkk. (2025). Kreasi Dakwah di Era AI: Optimalisasi Penyiaran Islam dengan Kecerdasan Buatan. *Global Aksara Pers*.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial.
- Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. (2025). Konsultasi Publik Buku Putih Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional dan Konsep Pedoman Etika Kecerdasan Artifisial.
- Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. (2026). Komdigi Siapkan Strategi AI Nasional untuk Lawan Disinformasi dan Jaga Kepercayaan Publik. 9 April 2026.
- Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. (2026). Kemkomdigi Jadikan Perpres AI sebagai Langkah Awal Menuju Undang-Undang AI. 28 Juli 2026.
- Marwantika, A. I., & Dauda, K. O. (2025). Da'wah in the Algorithmic Era: Investigating Bias and Validity of Islamic Artificial Intelligence Applications. *Muharrrik: Jurnal Dakwah dan Sosial*, 8(2).
- Miao, F., & Holmes, W. (2023). Guidance for Generative AI in Education and Research. UNESCO.
- National Institute of Standards and Technology. (2023). Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0). NIST AI 100-1.
- OECD. (2024). OECD AI Principles (updated 2024). Organisation for Economic Co-operation and Development.
- Rahman, A. F., Karimah, A., & Maulana, M. R. (2026). Etika Islam terhadap Perkembangan Kecerdasan Buatan: Kajian Normatif Berdasarkan Prinsip Maqasid al-Shariah. *Journal of Islamic Research and Studies*, 2(3). <https://doi.org/10.70716/jirs.v2i3.407>
- Setiawan, A. T., dkk. (2022). The Evolution of Islamic Preaching by the Existence of Smartphones. *Pekommas*, 7(1).
- Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence. (2026). Artificial Intelligence Index Report 2026. Stanford University.
- UNESCO. (2021). Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence. Adopted 23 November 2021.
- UNESCO. (2023). Guidance for Generative AI in Education and Research. UNESCO.
- World Economic Forum. (2025). Future of Jobs Report 2025. World Economic Forum.
- West, D. M. (2018). The Future of Work: Robots, AI, and Automation. Brookings Institution Press.

- KASMUI -
Dosen Kimia, Komputasi, IT, AI UNNES

<https://hisabmu.com/>
<https://kasmui.cloud/>

Ketua PCM Gunungpati 2	Anggota Majelis Tabligh PDM Kota Semarang & PWM Jawa Tengah	Tim Pengembang Software KHGT MTT PP Muhammadiyah	Praktisi Ilmu Falak
---------------------------	---	--	------------------------

Dakwah Inovatif Di Era AI

Buku ini mengulas bagaimana dakwah Islam bertransformasi di tengah perkembangan kecerdasan buatan. Dengan bahasa yang akademik namun tetap komunikatif, pembaca diajak memahami konsep dasar AI, peluang pemanfaatannya dalam penyusunan materi dakwah, pengelolaan media sosial, pembuatan konten audio-video, chatbot, hingga personalisasi pesan keagamaan.

Di sisi lain, buku ini juga membahas tantangan penting seperti validitas ilmu, etika, privasi data, bias algoritma, disinformasi, dan tata kelola penggunaan AI menurut nilai-nilai Islam. Disusun bagi mahasiswa, dosen, mubaligh, ustadz, dan cendekiawan Muslim, buku ini menawarkan panduan reflektif sekaligus praktis agar AI menjadi sarana penguat dakwah yang cerdas, amanah, dan berkemajuan.